

**STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN
HUTAN (KPH) KUSAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM
PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK)**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) pada
Program Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya**

Disusun Oleh:

Risky Nur Amelia

145120201111101



JURUSAN ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

2018

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**Strategi Komunikasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam
Mengimplementasikan Program Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

Risky Nur Amelia

NIM. 145120201111101

Telah diuji dan dinyatakan LULUS dalam ujian Sarjana pada tanggal

17 Desember 2018

Pembimbing

Yun Fitrahyati Laturrahmi, S.I.Kom., M.I.Kom
NIP/NIK. 2013068606112001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

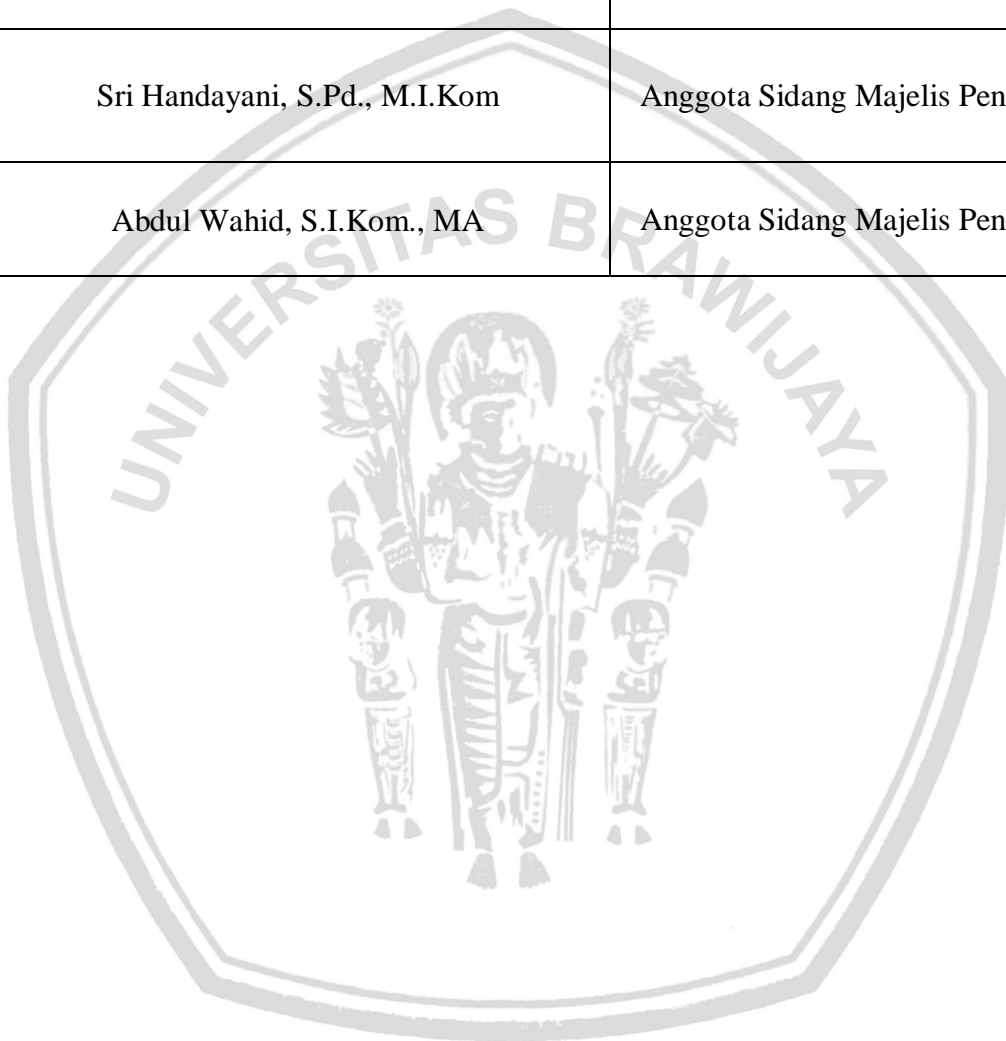


Prof. Dr. Lutfi Lugigdo, S.E., M.Si.AK
NIP. 1967081419940210 01

LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI

Skripsi ini telah diuji oleh tim penguji pada tanggal 17 Desember 2018 dengan daftar penguji sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN PENGUJI
1.	Yun Fitrahyati Laturrakhmi, S.I.Kom., M.I.Kom	Ketua Majelis Sidang
2.	Sri Handayani, S.Pd., M.I.Kom	Anggota Sidang Majelis Penguji 1
3.	Abdul Wahid, S.I.Kom., MA	Anggota Sidang Majelis Penguji 2



PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Risky Nur Amelia

NIM : 145120201111101

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Peminatan : Komunikasi Massa

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Strategi Komunikasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam Mengimplementasikan Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)”** adalah benar – benar karya sendiri. Hal – hal yang bukan karya sendiri dalam skripsi ini diberi tanda sitasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dalam skripsi tersebut.

Malang, Desember 2018



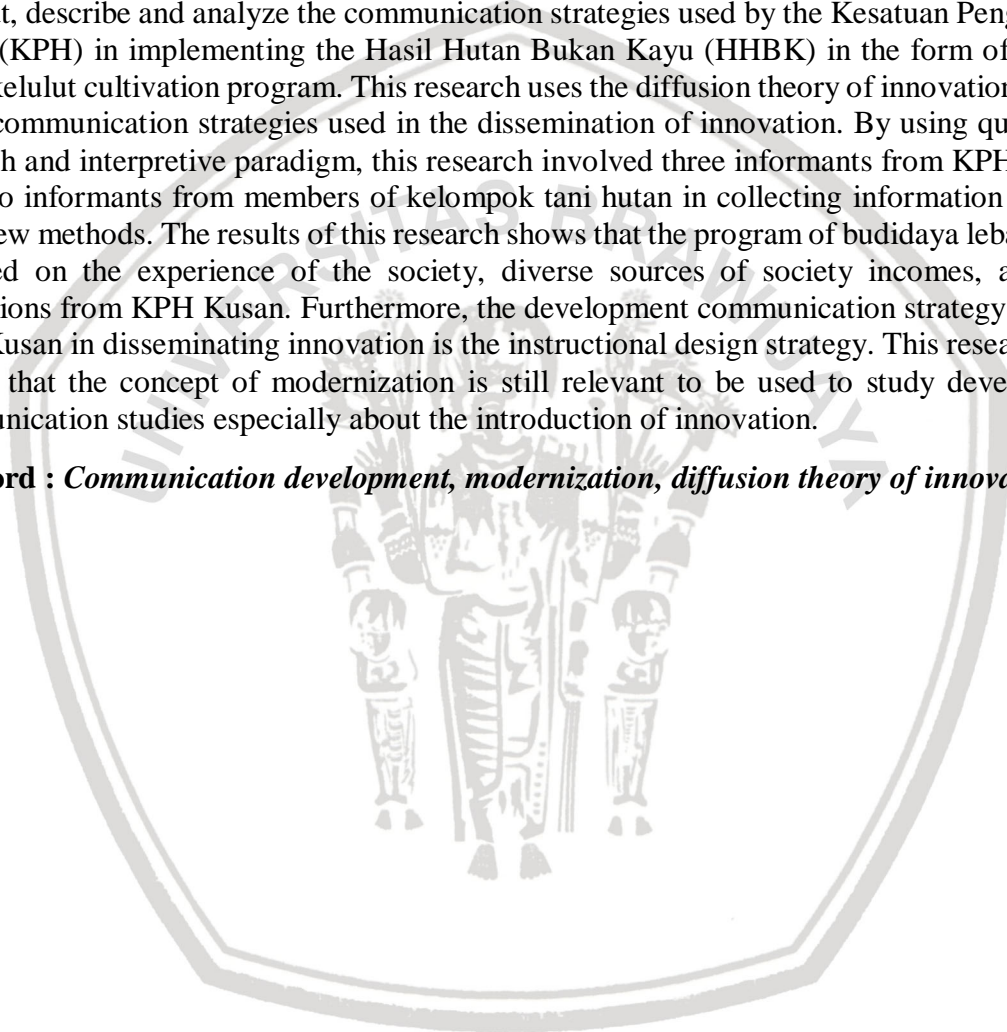
Risky Nur Amelia
145120201111101

ABSTRACT

Risky Nur Amelia. (145120201111101). COMMUNICATION DEVELOPMENT STRATEGY OF KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KUSAN IN IMPLEMENTING THE PROGRAM FOR THE UTILIZATION OF HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK). Advisor: Yun Fitrahyati Laturrahmi, S.I.Kom., M.I.Kom.

The study of development communication is closely related to innovations that are disseminated to the society. Several previous studies used the concept of innovation to see how innovation is accepted by the society as an adopter target. Meanwhile, several other studies focused on communication strategies used to disseminate innovation. This research aims to find out, describe and analyze the communication strategies used by the Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) in implementing the Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) in the form of a lebah madu kelulut cultivation program. This research uses the diffusion theory of innovation to look at the communication strategies used in the dissemination of innovation. By using qualitative research and interpretive paradigm, this research involved three informants from KPH Kusan, and two informants from members of kelompok tani hutan in collecting information through interview methods. The results of this research shows that the program of budidaya lebah madu is based on the experience of the society, diverse sources of society incomes, and new regulations from KPH Kusan. Furthermore, the development communication strategy used by KPH Kusan in disseminating innovation is the instructional design strategy. This research also proves that the concept of modernization is still relevant to be used to study development communication studies especially about the introduction of innovation.

Keyword : *Communication development, modernization, diffusion theory of innovation.*



ABSTRAK

Risky Nur Amelia. (145120201111101). STRATEGI KOMUNIKASI PEMBANGUNAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KUSAN DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN PROGRAM PEMANFAATAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU (HHBK). Pembimbing: Yun Fitrahyati Laturrakhmi, S.I.Kom., M.I.Kom.

Kajian komunikasi pembangunan erat kaitannya dengan inovasi yang disebarkan kepada masyarakat. Beberapa penelitian sebelumnya menggunakan konsep difusi inovasi untuk melihat bagaimana inovasi diterima oleh masyarakat sebagai target adopter. Sementara itu beberapa penelitian lainnya berfokus pada strategi komunikasi yang digunakan untuk menyebarkan inovasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi yang digunakan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam mengimplementasikan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam bentuk program budidaya lebah madu kelulut. Penelitian ini menggunakan teori difusi inovasi untuk melihat strategi komunikasi yang digunakan dalam penyebaran inovasi. Dengan menggunakan penelitian kualitatif dan paradigma interpretif, penelitian ini melibatkan tiga informan dari KPH Kusan, dan dua informan dari anggota kelompok tani hutan dalam mengumpulkan informasi melalui metode wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program budidaya lebah madu kelulut didasarkan pada pengalaman masyarakat, sumber pendapatan masyarakat yang beragam, dan peraturan baru dari KPH Kusan. Selain itu, strategi komunikasi pembangunan yang digunakan oleh KPH Kusan dalam menyebarkan inovasi adalah strategi desain intruksional. Penelitian ini juga membuktikan bahwa konsep modernisasi masih relevan digunakan untuk mengkaji studi komunikasi pembangunan khususnya tentang pengenalan inovasi.

Kata Kunci : *Komunikasi pembangunan, modernisasi, teori difusi inovasi.*

KATA PENGANTAR

Pertama dan paling utama rasa terima kasih penulis persembahkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat-Nya setiap saat bahkan saat dilupakan. Rasa syukur juga penulis panjatkan karena telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya skripsi berjudul **“Strategi Komunikasi Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam Mengimplementasikan Program Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)”**.

1. Papah dan Mamah serta keluarga tersayang yang telah memberikan doa, perhatian dan dukungan dalam segala bentuk yang tak henti – hentinya selama proses kuliah hingga pengerjaan skripsi.
2. Ibu Yun Fitrahyati Laturrahmi, S.I.Kom., M.I.Kom selaku dosen pembimbing skripsi yang tidak pernah segan untuk membagi ilmunya kepada penulis. Berkat bantuan dan kesabaran beliau penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Kendor, Papaw, Jebe, Mbut, Doppel, Caca sebagai kerabat seperkopian dan seperkretekan yang selalu membuat hari – hari penuh tawa selama di Malang.
4. Seluruh sahabat yang mau direpotkan selama penulis berdomisili di Malang.
5. Seluruh staf Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan terutama Yumpe dan Nurul serta anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) yang bersedia menjadi informan dan membantu dalam pengumpulan data.
6. Seluruh kedai kopi yang pernah menjadi saksi keseriusan saya dalam mengerjakan skripsi terutama Upajiwo.
7. Seluruh pihak yang ikut berkontribusi dalam setiap langkah dan proses pengerjaan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh sempurna sehingga kritik dan saran yang membangun diperlukan untuk menghasilkan karya yang lebih baik. Akhir kata peneliti berharap agar skripsi ini berguna bagi seluruh pihak yang membacanya, terutama bagi civitas ilmu komunikasi.

Malang, Desember 2018

Risky Nur Amelia



DAFTAR ISI

PERNYATAAN ORISINALITAS.....	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR DAFTAR PENGUJI SKRIPSI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRACT.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR GAMBAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR BAGAN.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
1.1 Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
1.2 Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
1.4 Manfaat Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
2.1 Paradigma Besar dalam Kajian Komunikasi Pembangunan	Error! Bookmark not defined.
A. Paradigma Modernisasi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Paradigma Partisipatoris	Error! Bookmark not defined.
2.2 Teori Difusi Inovasi dan Kaitannya dengan Komunikasi Pembangunan	Error! Bookmark not defined.
2.3 Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.2 Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.3 Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
3.4 Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.1 Data Primer.....	Error! Bookmark not defined.
3.4.2 Data Sekunder.....	Error! Bookmark not defined.
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
3.6 Teknik Pemilihan Informan	Error! Bookmark not defined.
3.7 Teknik Analisis Data	Error! Bookmark not defined.
3.8 Keabsahan Data.....	Error! Bookmark not defined.

3.8.1	Kompetensi Subjek Riset	Error! Bookmark not defined.
3.8.2	Triangulasi Sumber	Error! Bookmark not defined.
3.8.3	Triangulasi Metode	Error! Bookmark not defined.
3.9	Etika Penelitian	Error! Bookmark not defined.
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....		Error! Bookmark not defined.
4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.1	Gambaran Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan sebagai Komunikator Program.....	Error! Bookmark not defined.
4.1.2	Gambaran Umum Program Usaha Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)	Error! Bookmark not defined.
4.1.3	Profil Informan	Error! Bookmark not defined.
4.2	Penyajian Data.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.1	Persepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan tentang Program Budidaya Lebah Madu Kelulut	Error! Bookmark not defined.
4.2.2	Upaya Pengkomunikasian Program oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.3	Hambatan terhadap Pengkomunikasian Program.....	Error! Bookmark not defined.
4.2.4	Persepsi Masyarakat terhadap Program Budidaya Lebah Madu Kelulut	Error! Bookmark not defined.
4.3	Upaya Pengkomunikasian Program Berkaitan dengan Hambatan yang Muncul	Error! Bookmark not defined.
4.4	Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
5.1.1	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
5.2	Limitasi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
5.3	Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.

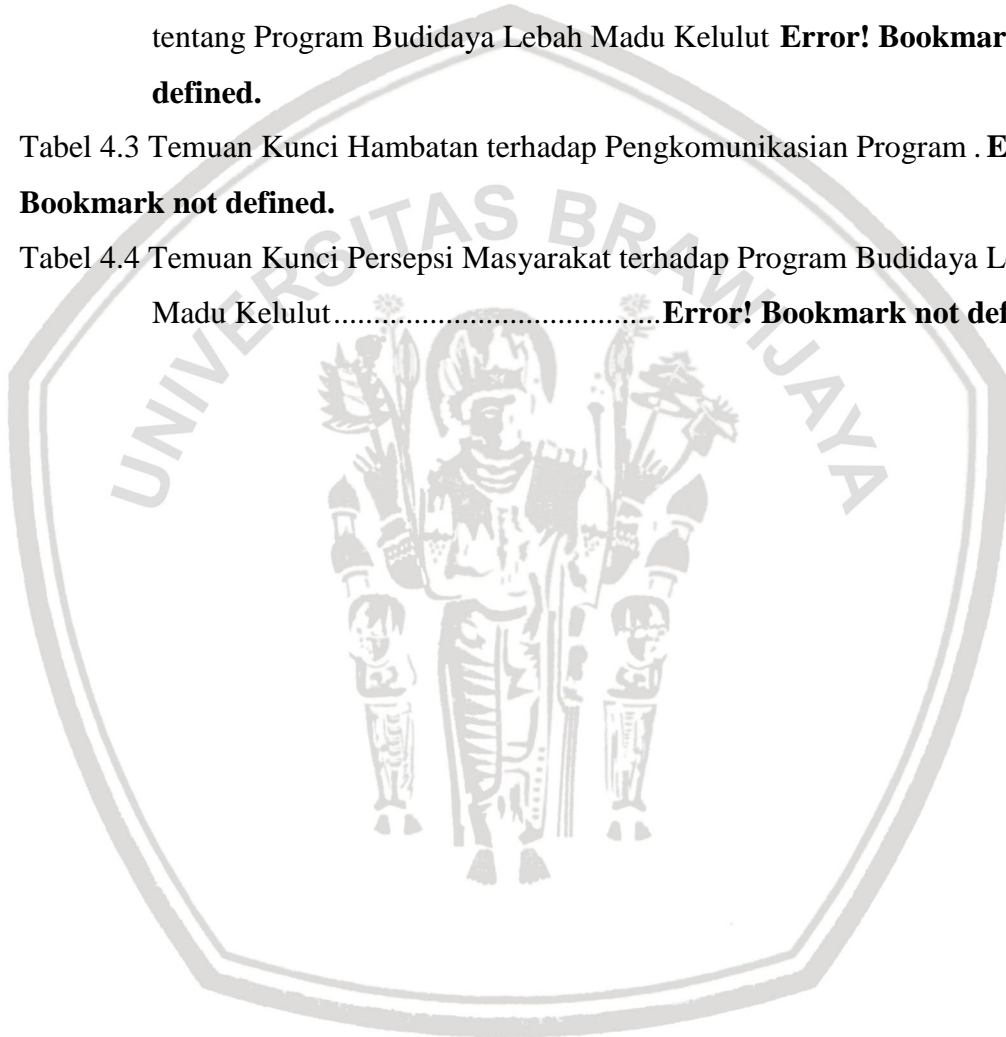
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Temuan Kunci Persepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan tentang Program Budidaya Lebah Madu Kelulut **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.2 Temuan Kunci Persepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan tentang Program Budidaya Lebah Madu Kelulut **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.3 Temuan Kunci Hambatan terhadap Pengkomunikasian Program . **Error! Bookmark not defined.**

Tabel 4.4 Temuan Kunci Persepsi Masyarakat terhadap Program Budidaya Lebah Madu Kelulut.....**Error! Bookmark not defined.**





DAFTAR GAMBAR

- Gambar 4.1 Logo Kesatuan Pengelolaan Hutan 2. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.2 Tampilan Tampak Depan Brosur Budidaya Lebah Kelulut 3.... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.3 Tampilan Tampak Belakang Brosur Budidaya Lebah Kelulut 4 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.4 Powerpoint Penguatan Lembaga Kelompok Tani Hutan (KTH)5
..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.5 Powerpoint Peran KPH dalam Pengembangan HHBK 6 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.6 Powerpoint Analisa Usaha dan Pemasaran 7 ... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.7 Powerpoint Biologi Lebah Kelulut 8. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.8 Powerpoint Budidaya Lebah Madu 9 **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.9 Powerpoint Beternak Lebah Kelulut 12..... **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.10 Powerpoint Peralatan Budidaya 11 .. **Error! Bookmark not defined.**
- Gambar 4.11 Powerpoint Panen dan Pasca Panen 10..... **Error! Bookmark not defined.**



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran **Error! Bookmark not defined.**





BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan catatan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia pada situs *WWF.or.id*, sedikitnya 1,1 juta hektar atau 2% dari hutan Indonesia menyusut setiap tahunnya. Data Kementerian Kehutanan menyebutkan dari sekitar 130 juta hektar hutan yang tersisa di Indonesia, 42 juta hektar di antaranya sudah habis ditebang. Kerusakan atau ancaman yang paling besar terhadap hutan alam di Indonesia adalah penebangan liar, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, kebakaran hutan dan eksploitasi hutan secara tidak lestari baik untuk pengembangan pemukiman, industri, maupun akibat perambahan. Kerusakan hutan yang semakin parah menyebabkan terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan lingkungan di sekitarnya. Untuk sektor kehutanan sendiri, kerusakan hutan akan mempengaruhi kapasitas penyediaan air, kemampuan pencegahan banjir, pariwisata alam, keanekaragaman hayati (*biodiversity*), penyerapan karbon (*carbon sequestration*), dan sebagainya, di samping hilangnya produk ekstraktif seperti kayu hutan dan produk non – kayu (Suparmoko dkk, 2014).

Merujuk pada *Deutsch Welle* (2017), *World Wildlife Fund* (WWF) dalam laporan tahunannya mengenai situasi lingkungan di Kalimantan menyebutkan bahwa hutan Kalimantan diyakini akan menyusut 75 persen pada 2020. Hal ini disebabkan oleh laju penebangan hutan dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan kelapa sawit, penambangan dan pertanian. Dari sekitar 74 hektar hutan

yang dimiliki Kalimantan, hanya 71% yang tersisa pada 2005. Sementara jumlahnya pada 2015 menyusut menjadi 55%. Jika laju penebangan hutan tidak berubah, Kalimantan diyakini akan kehilangan 6 juta hektar hutan hingga tahun 2020, artinya hanya kurang dari sepertiga luas hutan yang tersisa. Pada tahun 2011, berdasarkan kajian Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kerugian akibat kerusakan hutan di empat provinsi di Kalimantan diperkirakan mencapai Rp 241 Triliun.

Menindaklanjuti kondisi tersebut Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kehutanan telah menetapkan berbagai kebijakan. Salah satu kegiatan dalam revitalisasi sektor kehutanan tersebut adalah dengan memfasilitasi pembangunan hutan rakyat seluas 2 juta hektar. Untuk kelanjutan kebijakan tersebut di atas, maka Kementerian Kehutanan untuk tahun 2010-2014, juga membuat kebijakan prioritas yaitu: pemantapan kawasan, rehabilitasi hutan dan pengendalian kebakaran hutan, konservasi dan keanekaragaman hayati, revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan, pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan, dan penguatan kelembagaan kehutanan (Aryadi, 2012).

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.19/Menhut-II/2009 menyebutkan bahwa sumberdaya hutan (SDH) mempunyai potensi multi fungsi yang dapat memberikan manfaat ekonomi, lingkungan dan sosial bagi kesejahteraan umat manusia. Manfaat tersebut bukan hanya berasal dari Hasil Hutan Kayu (HHK) seperti yang terjadi saat ini, melainkan juga manfaat Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Sejalan dengan itu, Kementerian Kehutanan membuat sebuah program dalam upaya menyelamatkan hutan Indonesia yaitu dengan program Hasil

Hutan Bukan Kayu (HHBK). Hasil Hutan Bukan Kayu adalah salah satu program Kementerian Kehutanan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2007. Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya serta jasa yang berasal dari hutan. Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan.

Baharuddin & Taskirawati (2009) menyebutkan bahwa Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) penting untuk konservasi, kelestarian dan ekonomi. Penting untuk konservasi sebab untuk mengeluarkan hasil hutan bukan kayu biasanya dapat dilakukan dengan kerusakan minimal terhadap hutan. HHBK penting untuk kelestarian sebab proses panen biasanya dapat dilakukan secara lestari dan tanpa kerusakan hutan. Penting untuk ekonomi karena bukantimber produk ini berharga atau memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Dalam lingkup daerah, Provinsi Kalimantan Selatan adalah salah satu provinsi yang menjadi fokus dalam perbaikan tata kelola sumber daya alam khususnya hutan. Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Hanif, dalam situs www.mediaindonesia.com menyebutkan bahwa sebanyak 600 dari total 1.866 desa di Kalimantan Selatan berada di dalam kawasan hutan. Keberadaan desa di dalam kawasan hutan berisiko menimbulkan banyak masalah, diantaranya sengketa dengan perusahaan hak pengusahaan hutan, hutan tanaman industri, perkebunan, dan pertambangan. Untuk mengatasi konflik, pemerintah mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar hutan lewat perhutanan sosial. Melalui

pengembangan program hutan rakyat (*farm forestry*) yang berkelanjutan dari tahun ke tahun serta pengelolaannya diarahkan sebagai usaha kelompok tani secara mandiri, diharapkan akan mempercepat upaya rehabilitasi lahan, perbaikan lingkungan, pemenuhan kebutuhan kayu sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan sekitar hutan (Aryadi, 2012).

Pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan membuat kebijakan yang terencana untuk pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan yang ada di daerahnya (Aryadi, 2012). Budidaya lebah madu kelulut (trigona) merupakan salah satu program yang direalisasikan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai salah satu program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). KPH Kusan memiliki potensi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang melimpah dan telah mendapat perhatian serius dari KPH sebagai pengelola kawasan hutan di antaranya kayu manis, kemiri dan madu lebah kelulut (lebah trigona) (Sispandok KPH, 2018).

Hal yang menarik adalah ketika membicarakan pengembangan madu lebah kelulut. Budidaya madu lebah kelulut sebagai salah satu program pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dapat dikategorikan sebagai sebuah inovasi. Rogers (1983) menyebutkan bahwa inovasi adalah sebuah ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Nasution (1996) menyebutkan peran komunikasi secara luas dalam mengubah masyarakat melalui penyebarserapan ide – ide dan hal – hal yang baru adalah kegiatan yang dikenal dengan difusi inovasi. Difusi merupakan suatu bentuk khusus komunikasi. Menurut Rogers dan

Shoemaker (1971), studi difusi mengkaji pesan – pesan yang berupa ide – ide ataupun gagasan – gagasan pesan baru.

Berdasarkan data KPH Kusan tahun 2017, potensi yang dapat dikembangkan di wilayah KPHP Tanah Bumbu pada awalnya hanyalah kayu manis. Potensi ini telah diusahakan sejak lama oleh masyarakat adat di sekitar pegunungan meratus. Namun, selama ini masyarakat sekitar hutan tidak dapat melihat sendiri adanya potensi lain yang dapat dikembangkan. Hal ini dikarenakan para kelompok tani hutan bersifat pasif dan hanya mengharapkan arahan dari KPH. Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai KPH, selama ini para masyarakat hanya bergantung pada satu potensi yaitu pengolahan kayu manis. Maka program pengembangan madu lebah kelulut di kawasan hutan ini menjadi salah satu inovasi bagi para masyarakat.

Sehubungan dengan penelitian ini, hasil observasi peneliti menunjukkan bahwa untuk menyukseskan program HHBK KPH Kusan sebagai pembuat inovasi menunjuk tujuh Kelompok Tani Hutan (KTH) yang masing – masing terdiri atas 30 orang. Para peserta diberi pelatihan dengan metode diskusi dan ceramah oleh praktisi Himpunan Petani Lebah Madu Tanah Laut (HIPMATALA) selama tiga hari. Selain itu juga diberikan bimbingan teknis dari petugas yang telah terlatih selama enam bulan. Jangka waktu dalam mengadopsi inovasi program tersebut tidak berlangsung lama karena para petani tersebut masuk ke dalam karakteristik yang mudah mengadopsi inovasi. Hal ini dikarenakan mereka hanya diarahkan untuk menjalankan program dan mendapatkan fasilitas dari KPH Kusan berupa uang saku dan peralatan penunjang budidaya lebah madu kelulut.

Berbicara tentang difusi inovasi, pada dasarnya studi – studi sebelumnya telah banyak dilakukan, salah satunya oleh Romadhan (2010) tentang difusi inovasi teknologi komunikasi berupa internet di kalangan pondok pesantren Muhammadiyah. Target khusus yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah menjadikan hasil penelitian sebagai acuan (model) adopsi teknologi komunikasi (internet) di kalangan pondok pesantren Muhammadiyah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *grounded*, yaitu sebuah pendekatan yang reflektif dan terbuka, melalui pengumpulan data, pengembangan konsep – konsep teoritis, dan ulasan literatur berlangsung dalam proses yang berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahap – tahap proses difusi inovasi teknologi komunikasi (internet) di Pondok Pesantren Karangasem Muhammadiyah meliputi dua tahap yaitu tahap inisiasi dan tahap implementasi. Tahap inisiasi mencakup proses yang disebut *agenda setting*, atau penentuan kebutuhan terhadap internet dan *matching*, penyesuaian – penyesuaian sebelum adopsi internet dilakukan. Sedangkan tahap implementasi mencakup proses *redefining* atau *restructuring*, yaitu proses implementasi internet di pondok pesantren yang digunakan sebagai sarana penunjang pembelajaran dan pemenuhan kebutuhan para santri melalui warnet. Proses selanjutnya adalah *clarifying* dan *routinizing*, yaitu internet sudah digunakan dalam aktivitas sehari – hari di lingkungan pondok pesantren, untuk belajar bagi santri dan mencari bahan ajar bagi para guru. Pada tahap ini internet benar – benar telah menjadi elemen yang tidak terpisahkan dari pondok pesantren. Berkaitan dengan implementasinya, internet diaplikasikan ke dalam tiga wilayah yaitu di kantor yayasan, laboratorium komputer dan warnet. Adapun faktor – faktor

yang memengaruhi adopsi internet antara lain: 1) karena internet sebagai bentuk sebuah inovasi sangat bermanfaat dan memberikan banyak keuntungan bagi pondok pesantren. 2) adanya kesesuaian antara internet sebagai bentuk inovasi dengan nilai – nilai atau norma yang dianut oleh lembaga pondok pesantren ini. 3) adanya pandangan bahwa internet merupakan masalah duniawi yang urusannya diserahkan sepenuhnya kepada diri masing – masing.

Berbeda dengan Romadhan (2010), penelitian yang dilakukan oleh Melida (2015) bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi pelaksana Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) Kota Samarinda dalam menyosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada remaja. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman. Teori dan konsep yang dipakai pada penelitian ini adalah teori difusi inovasi, strategi komunikasi, sosialisasi, media sosialisasi, komunikasi pembangunan, komunikasi tatap muka, komunikasi bermedia dan penyuluhan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi pelaksana BKBKS Kota Samarinda dalam mensosialisasikan program PUP yaitu dengan menggunakan cara komunikasi tatap muka atau komunikasi *face to face* di bidang Keluarga Berencana (KB) selain itu juga menggunakan komunikasi bermedia di Bidang Penggerakan Keluarga dan Masyarakat (PKM).

Selain kedua penelitian tersebut, beberapa penelitian lain menempatkan petani sebagai objek penerima inovasi, seperti yang dilakukan oleh Istiati (2016). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui difusi inovasi dalam kegiatan

komunikasi pembangunan terhadap program Bantuan Bibit Gratis oleh Persemaian Permanen BPDASH SOP Yogyakarta pada masyarakat Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam hal ini inovasi yang dimaksud adalah program bantuan bibit gratis sebagai bentuk transformasi nilai-nilai penghijauan. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah komunikasi pembangunan, difusi inovasi dan unsur-unsur utama inovasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai penghijauan dalam kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh BPDASHL SOP pada program bantuan bibit gratis di masyarakat desa Gading belum optimal. Ketidakmaksimalan upaya komunikasi yang dilakukan pihak Persemaian Permanen BPDASHL SOP dikarenakan kurangnya media yang mereka gunakan dalam menginformasikan program. Selain itu, kondisi masyarakat desa Gading yang umumnya adalah petani menjadi salah satu faktor alasan untuk memanfaatkan lahan mereka untuk menanam pohon. Disamping itu, ketergantungan masyarakat yang besar terhadap pemimpin opini yang menjadikan umumnya masyarakat desa Gading masih kurang aktif dalam berinisiatif dalam memperoleh informasi yang berkembang. Dari beberapa kendala diatas, peneliti menilai Persemaian Permanen BPDASHL SOP sudah memiliki solusi efektif untuk realitas yang ditemui di masyarakat desa Gading. Hanya saja solusi ini belum efektif diinformasikan di masyarakat desa Gading secara merata.

Di samping itu, penelitian yang dilakukan oleh Warnaen dkk (2016) bertujuan untuk menguji proses adopsi inovasi pada petani tanaman pangan di Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi pada petani di Kabupaten Takalar, khususnya di Kecamatan Polobangkeng Utara diawali dengan beberapa tahap, mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa difusi dari proses inovasi dan desain inovasi yang terjadi pada petani adalah satu arah yaitu dari peneliti atau pemangku kebijakan disebarkan oleh agen perubahan dan dipraktikan oleh petani sehingga petani tidak dilibatkan dalam penciptaan sebuah inovasi.

Sejalan dengan temuan Warnaen dkk (2016) bahwa calon adopter tidak selalu dilibatkan secara aktif, penelitian yang dilakukan oleh Pratama (2016) menunjukkan bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa difusi inovasi program Jaminan Kesehatan Nasional dalam penelitian ini merupakan proses difusi inovasi dengan sistem difusi inovasi sentralik. Dimana pemerintah membuat sebuah inovasi berupa program Jaminan Kesehatan Nasional yang kemudian disebarkan dengan paket informasi yang sama kepada calon *adopter* yang bertindak sebagai penerima pasif. Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data dengan metode kualitatif deskriptif.

Berdasarkan penelitian di atas, peneliti menyoroti bahwa studi – studi tentang difusi inovasi yang dilakukan sebelumnya terbagi menjadi dua pola yaitu berfokus pada strategi komunikasi yang digunakan oleh komunikator program dan berfokus pada proses yang terjadi pada target adopter. Adapun penelitian ini mengikuti pola yang berfokus pada strategi komunikasi yang dilakukan oleh komunikator program yang dalam hal ini adalah Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam proses penyebaran inovasi. Penelitian ini berusaha

mendeskripsikan strategi komunikasi yang digunakan untuk menumbuhkan minat dan partisipasi masyarakat khususnya petani hutan agar mampu menerima dan merealisasikan inovasi yang disampaikan dalam program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu. Dengan demikian, penelitian ini termasuk ke dalam kajian komunikasi pembangunan. Hadebro (1979) dalam Nasution (1996) menyebutkan bahwa salah satu aspek komunikasi pembangunan adalah pendekatan yang berorientasi kepada perubahan yang terjadi pada suatu komunitas lokal atau desa. Konsentrasinya adalah pada memperkenalkan ide – ide baru, produk dan cara – cara baru dan penyebarannya di suatu desa atau wilayah. Studi jenis ini mendalami bagaimana aktivitas komunikasi dapat digunakan untuk mempromosikan penerimaan yang luas akan ide – ide dan produk baru.

Menurut Tahoba (2011), salah satu pendekatan untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat adalah melalui komunikasi pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat dikatakan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi aktif para pelaku pembangunan. Partisipasi aktif dalam pembangunan itu meliputi: identifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki, penyusunan rencana, pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi, kaderisasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan (Halim dkk, 2005). Tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan (Harun & Ardianto, 2012). Melalui komunikasi pembangunan, pemerintah atau pihak – pihak tertentu dapat dengan mudah menjalankan program yang bertujuan memberdayakan masyarakat. Dalam konteks kajian komunikasi pembangunan, kontribusi yang dapat diberikan oleh penelitian ini pada penelitian – penelitian

komunikasi pembangunan sebelumnya adalah menyajikan gambaran tentang strategi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) sebagai pelaksana program untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya madu lebah kelulut (lebah trigona).

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini mengikuti paradigma modernisme. Amina (2017) mengasumsikan bahwa, paradigma modernisme menggunakan pendekatan “tetesan ke bawah”. Dengan kata lain, informasi dan pengaruh mengalir dalam satu arah dari pengirim ke penerima. Meskipun paradigma modernisme dianggap gagal paradigma modernisme pada penelitian ini dikarenakan modernisme masih relevan untuk kasus – kasus tertentu.

Soetriono, dkk (2006) dalam Harinta (2011) menyatakan bahwa pada dasarnya sebagai individu petani tidak mempunyai kemampuan untuk mengubah keadaan usaha taninya. Oleh karena itu, keberadaan bantuan dari luar sangat diperlukan, baik secara langsung dalam bentuk bimbingan dan pembinaan usaha maupun tidak langsung dalam bentuk intensif yang dapat mendorong petani menerima hal-hal baru dalam mengadakan tindakan perubahan. Schoorl dalam Harun dan Ardiyanto (2012) mengemukakan bahwa dalam lingkup masyarakat pedesaan mungkin modernisasi dianggap tidak menyenangkan, tetapi berbeda dengan para petani di Desa Mantewe yang menerima modernisasi sebagai sebuah tujuan. Maka dari itu, paradigma modernisme masih relevan untuk digunakan pada penelitian ini.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelola Hutan (KPH) Kusan Kabupaten Tanah Bumbu dalam implementasi program pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kepada masyarakat sekitar hutan?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan (KPHP – Unit VI Tanah Bumbu) dalam implementasi program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bisa berkontribusi bagi pengembangan kajian komunikasi pembangunan khususnya dalam riset – riset tentang difusi inovasi yang berfokus pada strategi komunikasi oleh komunikator program. Serta dapat menjadi referensi dan informasi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian sejenis.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Paradigma Besar dalam Kajian Komunikasi Pembangunan

Riva'i (2016) menyebutkan bahwa secara konseptual komunikasi dan pembangunan bersumber dari teori komunikasi dan teori pembangunan. Sumber – sumber yang ada pada keduanya menekankan pada prinsip partisipasi sosial. Kontak sosial dan komunikasi merupakan bagian dari unsur yang digunakan untuk menghubungkan orang – orang yang terlibat di dalam pembangunan. Suhartini dkk (2005) juga menyebutkan bahwa antara komunikasi dan pembangunan terdapat keterkaitan penting, khususnya pada proses pelaksanaan pembangunan. Komunikasi pembangunan dapat dikatakan sebagai komunikasi yang dirancang, dan sebagai bagian dari kegiatan pembangunan dengan tujuan untuk mendorong partisipasi aktif para pelaku pembangunan. Partisipasi aktif dalam pembangunan tersebut meliputi: identifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki, penyusunan rencana, pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi, kaderisasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Nasution (1996) berasumsi bahwa konsep komunikasi pembangunan dapat dilihat dalam arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, dikemukakan bahwa komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, kemudian pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Sedangkan dalam arti yang sempit, komunikasi

pembangunan merupakan segala upaya dan cara, serta teknik penyampaian gagasan, dan keterampilan – keterampilan pembangunan yang berasal dari pihak yang memprakarsai pembangunan dan ditujukan kepada masyarakat luas. Kegiatan tersebut bertujuan agar masyarakat yang dituju dapat memahami, menerima, dan berpartisipasi dalam melaksanakan gagasan – gagasan yang disampaikan tadi. Sedangkan Widjaja A.W dan Hawab, serta Arsyik (dalam Dilla, 2007) mengartikan komunikasi pembangunan secara singkat yaitu komunikasi yang berisi pesan – pesan pembangunan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa komunikasi pembangunan merupakan suatu inovasi yang diterima oleh masyarakat melalui proses komunikasi.

Harun & Ardianto (2012) mengemukakan tujuan komunikasi pembangunan ialah untuk memajukan pembangunan. Komunikasi pembangunan yang diutamakan adalah kegiatan mendidik dan memotivasi masyarakat, bukannya memberikan laporan tidak realistis dari fakta – fakta atau sekedar penonjolan diri. Keragaman itu pada hakikatnya memiliki misi yang sama yaitu mengomunikasikan ide – ide dan program – program pembangunan kepada khalayak yang menjadi sasaran ataupun yang dimaksudnya kelak sebagai penerima manfaat kegiatan yang bersangkutan. Jika dikaitkan dengan penelitian ini, fungsi komunikasi pembangunan terletak pada tujuan program tersebut diimplementasikan. Tujuan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menurut Baharuddin dan Taskirawati (2009), penting untuk konservasi sebab mengeluarkan hasil hutan bukan kayu biasanya dapat dilakukan dengan kerusakan minimal terhadap hutan. HHBK juga penting untuk ekonomi karena hasil produk ini berharga dan memiliki nilai

ekonomi yang tinggi yang dalam penelitian ini adalah program budidaya lebah madu kelulut. Maka dari itu, fungsi komunikasi pembangunan adalah untuk mengkomunikasikan hingga memotivasi masyarakat untuk ikut serta dalam program tersebut.

Menurut Dilla (2007), pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen, yakni: (1) komunikator pembangunan, yaitu bisa aparat pemerintah ataupun masyarakat; (2) pesan pembangunan, yaitu ide – ide atau pun program – program pembangunan; dan (3) komunikan pembangunan, yaitu masyarakat luas, baik penduduk desa maupun kota yang menjadi sasaran pembangunan. Dengan demikian, usaha – usaha pembangunan seharusnya diwujudkan dengan konsep pembangunan yang berpusat kepada rakyat. Untuk menyukseskan usaha – usaha pembangunan tersebut dibutuhkan strategi yang tepat seperti yang dikemukakan oleh AED (dalam Harun dan Ardiyanto, 2012). Empat strategi komunikasi pembangunan yang telah digunakan selama ini, yaitu:

1. Strategi – strategi berdasarkan media (*media-based strategies*)
Strategi ini merupakan teknik yang paling mudah, paling populer, dan tentunya yang paling kurang efektif. Sejumlah penelitian yang diarahkan pada strategi media tertentu telah dilakukan terutama untuk mengetahui “media manakah yang terbaik?”, “media apakah yang termurah biayanya?”, “media apakah yang terbaik untuk mempopulerkan, mengajarkan, memantapkan, atau mengingatkan sesuatu hal?”.
2. Strategi – strategi desain instruksional
Strategi ini pada umumnya digunakan oleh para pendidik. Mereka memfokuskan strateginya pada pembelajaran individu – individu yang dituju sebagai suatu sasaran yang fundamental. Strategi kelompok ini, mendasarkan diri pada teori – teori belajar formal, dan berfokus pada pendekatan sistem untuk pengembangan bahan – bahan (material) belajar. Kegiatan pada strategi ini dapat digolongkan ke dalam tiga tahapan yang luas dan saling berkaitan, yakni: tahap – tahap *perencanaan, implementasi, dan evaluasi*.

3. Strategi – strategi partisipatori

Dalam strategi ini, prinsip – prinsip penting dalam mengorganisasi kegiatan adalah kerja sama komunitas dan pertumbuhan pribadi (*community participation and personal growth*). Yang dipentingkan dalam strategi ini bukan pada berapa banyak informasi yang dipelajari seseorang melalui program komunikasi pembangunan, tetapi lebih pada pengalaman keikutsertaan sebagai seseorang yang berpengalaman (*equal*) dalam proses berbagai pengetahuan atau keterampilan.

4. Strategi – strategi pemasaran.

Strategi ini tumbuh sebagai suatu strategi komunikasi yang sifatnya paling langsung dan terasa biasa. Prinsip *social marketing* yang menjadi pegangan strategi ini yaitu “kalau anda dapat menjual pasta gigi, mengapa tidak dapat menjual kesehatan, pertanian, dan keluarga berencana?”.

Masing – masing strategi di atas memiliki karakteristik yang berbeda sehingga akan mempermudah komunikator untuk mencapai keberhasilan pembangunan. Sejalan dengan Harun dan Ardianto (2012) yang menyatakan bahwa strategi – strategi komunikasi pembangunan mencerminkan suatu prioritas tertentu mengenai bagaimana menggunakan komunikasi untuk mencapai kebutuhan – kebutuhan pembangunan. Strategi – strategi tersebut tidak bersifat kaku, artinya tidak sedikit program komunikasi pembangunan yang merupakan gabungan dari beberapa strategi. Sejalan dengan penelitian ini, tidak menutup kemungkinan bahwa strategi komunikasi pembangunan yang digunakan komunikator dalam mengajak para calon adopter akan menggunakan lebih dari satu strategi.

Secara umum, terdapat dua paradigma dalam teori pembangunan Dunia Ketiga. Martono (2016) menyebutkan, teori pembangunan Dunia Ketiga merupakan teori – teori pembangunan yang berusaha menyelesaikan masalah yang dihadapi negara – negara miskin atau negara – negara sedang berkembang.

2.1.1 Paradigma Modernisasi

Nasution (1996) menjelaskan bahwa model ini didasarkan pada asumsi bahwa negara – negara yang baru merdeka, menurut para ahli ekonomi barat harus dibebaskan dari lingkaran setan kemiskinan. Untuk keluar dari lingkaran tersebut, negara – negara ini memerlukan uang dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan industrialisasi. Sejak masa itulah berkembang rencana pembangunan yang menjadi pegangan bagi negara – negara yang baru merdeka tersebut. Dari sinilah asalnya berkembangnya pemikiran bahwa pembangunan adalah pertumbuhan (*growth*) terutama dalam bidang pendapatan, tabungan, dan pembentukan modal. Paradigma pembangunan yang berlaku pada saat itu dikenal sebagai paradigma modernisasi.

Menurut Yudistira dalam Dilla (2007), teori modernisasi adalah suatu deskripsi dan eksplanasi tentang proses transformasi dari masyarakat yang tradisional atau berkembang menuju masyarakat modern. Pernyataan tersebut sejalan dengan yang didefinisikan oleh Rogers dalam Harun & Ardianto (2012) bahwa modernisasi sebagai proses di mana individu – individu mengalami perubahan dari gaya hidup, tradisional ke gaya hidup yang lebih kompleks, berteknologi maju, dan cepat berubah. Secara relatif, Kanto (2006) mendefinisikan bahwa modernisasi berarti suatu upaya atau proses yang bertujuan untuk menyamai standar yang dianggap modern baik oleh rakyat banyak maupun oleh elit penguasa. Modernisasi berarti suatu proses mendifusikan suatu budaya atau inovasi kepada masyarakat dengan tujuan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, modernisasi erat kaitannya dengan proses difusi inovasi. Hal ini sejalan dengan

yang dinyatakan Gudykunts dan Mody (2002) bahwa difusi inovasi akan terus berevolusi sebagai kerangka untuk memandu perencanaan modernisasi.

Modernisasi dapat berdampak pada sebagian atau seluruh sektor kehidupan masyarakat (Kanto, 2006). Menurut Lauer dalam Kanto (2006), paling tidak modernisasi berdampak nyata pada enam aspek perubahan, yaitu: demografi, sistem stratifikasi, pemerintah, pendidikan, sistem keluarga, serta nilai, sikap dan kepribadian. *Pertama*, perubahan di bidang demografi, misalnya pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan menurunnya angka kematian, meningkatnya mobilitas tenaga kerja, dan meningkatnya usia harapan hidup. *Kedua*, sistem stratifikasi diikuti dengan semakin berkembangnya kelas menengah (*middle class*) dan meningkatnya peran wanita. *Ketiga*, modernisasi juga berdampak pada sistem pemerintahan, misalnya perkembangan demokratisasi dalam politik. *Keempat*, pada bidang pendidikan terjadi secara kuantitatif dan kualitatif. Secara kuantitatif terjadi perkembangan jumlah lembaga pendidikan dan jumlah pelajar atau mahasiswa. Sedangkan secara kualitatif, diarahkan untuk menghasilkan lulusan terbaik. *Kelima*, dalam kehidupan keluarga, sebagian besar tanggungjawab akan diserahkan kepada unit sosial lain seperti pemerintah, sekolah, dan badan – badan usaha. *Keenam*, dampak modernisasi pada perubahan nilai, sikap dan kepribadian mengarah pada terwujudnya manusia modern.

Modernisasi dapat terjadi dalam waktu yang singkat meskipun melalui proses yang panjang. Soemardjan (dalam Salim, 2002) dalam Martono (2016) menyebutkan beberapa tahapan proses berlangsungnya modernisasi. *Pertama*, modernisasi tingkat adat, ditandai dengan masuknya sebuah budaya baru atau alat

– alat industri yang menggunakan teknologi tinggi. Masyarakat pada tahap ini hanya mampu menggunakan alat – alat melalui petunjuk teknis atau buku panduan. *Kedua*, modernisasi tingkat lembaga, ditandai dengan masuknya jaringan sistem kerja modern. Modernisasi dalam tingkat institusi atau kelembagaan bertujuan melayani kepentingan negara. *Ketiga*, modernisasi tingkat individu, dalam tahap ini individu mampu menggunakan dan memperbaiki peralatannya sendiri. Keempat, modernisasi tingkat inovasi, ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk menciptakan sendiri sebuah budaya atau teknologi, meskipun harus melalui jaringan kerja dengan masyarakat yang lebih luas.

Selanjutnya, Lauer dalam Martono (2016) memberikan beberapa fenomena yang merupakan imbas modernisasi, salah satunya adalah munculnya berbagai bentuk organisasi, baik formal maupun sukarela. Organisasi banyak bermuculan seiring berkembangnya manusia modern dengan berbagai cita – cita dan kepentingan. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan dalam mengimplementasikan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kepada masyarakat yaitu dengan membentuk suatu organisasi yang dalam hal ini adalah kelompok tani hutan. Tujuan pembentukan kelompok tani hutan tersebut adalah sebagai calon adopter dalam menyukseskan program budidaya lebah madu kelulut.

2.1.2 Paradigma Partisipatoris

Dilla (2007) menyebutkan, konsep ini merupakan pendekatan baru dalam strategi komunikasi pembangunan. Konsep ini melihat unsur – unsur yang terlibat

dalam proses komunikasi (sumber-penerima) memiliki kesetaraan dalam posisi dan peran. Jika konsep ini digunakan maka akan membukakan jalan tumbuhnya kreativitas dan kompetensi masyarakat dalam mengomunikasikan gagasannya. Pendekatan partisipatoris sebagai strategi komunikasi pembangunan mengutamakan arus komunikasi yang berlangsung dua arah sebagai ciri komunikasi sosial dengan penggabungan model analisis isi media dan model yang berorientasi kepada khalayak. Dilla (2007) mengemukakan bahwa, proses ini memberi peran dan tanggung jawab bersama kepada semua pihak yang terlibat komunikasi dalam pendistribusian informasi secara merata dalam praktik komunikasi pembangunan. Sehingga proses pembangunan pada pendekatan ini bukan lagi proses produksi barang dan jasa di lapangan seperti menurut teori modernisasi, melainkan usaha strategi pembangunan.

Berdasarkan sistem dan mekanismenya, Cohen & Uphoff dalam Rivai'i (2016) membedakan partisipasi atas 4 (empat), antara lain:

- a. *Participation in decision making*, adalah partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan kebijakan organisasi. Partisipasi dalam bentuk ini berupa pemberian kesempatan pada masyarakat dalam mengemukakan pendapatnya untuk menilai suatu rencana atau program yang akan ditetapkan. Masyarakat juga diberikan kesempatan untuk menilai suatu keputusan atau kebijaksanaan yang sedang berjalan. Partisipasi dalam pembuatan keputusan adalah proses dimana prioritas – prioritas pembangunan dipilih dan dituangkan dalam bentuk program yang disesuaikan dengan kepentingan masyarakat. Dengan mengikutsertakan masyarakat, secara tidak langsung mengalami latihan untuk menentukan masa depannya sendiri secara demokratis.
- b. *Participation in implementation*, adalah partisipasi atau keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan operasional pembangunan berdasarkan program yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan program pembangunan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari jumlah (banyaknya) yang aktif dalam berpartisipasi, bentuk –

- bentuk yang dipartisipasikan misalnya tenaga, bahan, uang, semuanya atau sebagian – sebagian, partisipasi langsung atau tidak langsung, semangat berpartisipasi, sekali – kali atau berulang – ulang.
- c. *Participation in benefits*, adalah partisipasi masyarakat dalam menikmati atau memanfaatkan hasil – hasil pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerataan kesejahteraan dan fasilitas, pemerataan usaha dan pendapatan, ikut menikmati atau menggunakan hasil – hasil pembangunan (jalan, jembatan, gedung, air minum dan berbagai sarana serta prasarana sosial) adalah bentuk dari partisipasi dalam menikmati dan memanfaatkan hasil – hasil pembangunan. Penikmatan program pembangunan juga ditujukan kepada pegawai pengelola dalam peningkatan kesejahteraannya termasuk peningkatan daya potensi dan kreatifitasnya. Partisipasi pemanfaatan ini selain dapat dilihat dari penikmatan hasil – hasil pembangunan, juga terlihat pada dampak hasil pembangunan terhadap tingkat kehidupan masyarakat, peningkatan pembangunan berikutnya dan partisipasi dalam pemeliharaan dan perawatan hasil – hasil pembangunan.
 - d. *Participation in evaluation* adalah partisipasi masyarakat dalam bentuk keikutsertaan menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil – hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai secara tidak langsung, misalnya memberikan saran – saran, kritikan atau protes.

Berdasarkan penjelasan dari kedua paradigma tersebut, peneliti mengikuti paradigma modernisasi untuk mendukung penelitian ini. Hal ini dikarenakan paradigma modernisasi menyioroti komunikasi pembangunan dari segi perubahan masyarakat dari atas ke bawah (*top-down*) dan bersifat satu arah seperti yang dikatakan oleh Nasution (1996) bahwa modernisasi bersifat satu arah (*unilinear*), dan bersifat evolusioner yang dalam penelitian ini bersumber dari KPH Kusan sebagai pembuat kebijakan. Schoorl dalam Harun dan Ardiyanto (2012) mengemukakan, demi perkembangan dan pemeliharaan persatuan nasional pada negara – negara berkembang, perlu diadakan modernisasi kehidupan di pedesaan.

2.2 Teori Difusi Inovasi dan Kaitannya dengan Komunikasi

Pembangunan

Rivai'i (2016) menyebutkan, difusi merupakan proses ketika inovasi tersebar dalam sebuah sistem sosial, oleh karena itu difusi dipandang sebagai kajian komunikasi tersendiri yang memfokuskan studi tentang pesan yang berupa gagasan baru. Difusi sebagai sebuah proses penyebaran ide baru dapat terjadi jika ada inovasi, dikomunikasikan melalui saluran tertentu, dan dalam jangka waktu tertentu yang disalurkan kepada anggota suatu sistem sosial. Sedangkan, inovasi adalah sebuah gagasan, tindakan atau barang yang dianggap baru oleh seseorang yang kebaruannya bersifat relatif. Harun dan Ardianto (2012) menjelaskan bahwa pengadopsi inovasi itu mungkin saja suatu individu, kelompok ataupun organisasi. Alternatif – alternatif dan pilihan – pilihan dalam proses inovasi sampai derajat tertentu ditentukan oleh pengadopsi dan oleh kondisi sosial dan struktural yang ada.

Dilla (2007) menyebutkan, masuknya inovasi ke tengah – tengah sistem sosial disebabkan terjadinya komunikasi antaranggota suatu masyarakat, juga antara satu masyarakat dan masyarakat lain. Melalui saluran – saluran komunikasi terjadi pengenalan, pemahaman, dan penilaian yang kelak akan menghasilkan penerimaan ataupun penolakan terhadap suatu inovasi. Tetapi tidak semua masyarakat dapat menerima begitu saja setiap adanya pembaharuan. Tidak jarang proses ini membutuhkan waktu panjang, bahkan menimbulkan pro dan kontra yang tercermin dalam berbagai sikap dan tanggapan dari anggota masyarakat. Rogers

(1983) menyebutkan dalam proses difusi inovasi terdapat 4 (empat) elemen pokok, yaitu inovasi, saluran komunikasi, jangka waktu, dan sistem sosial.

Inovasi, yaitu gagasan, tindakan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Dalam hal ini kebaruan inovasi diukur secara subjektif menurut pandangan individu yang menerimanya. Jika gagasan itu dianggap baru oleh seseorang maka dapat disebut sebagai inovasi. Aspek baru dari suatu inovasi dapat dinyatakan dalam pengetahuan, persuasi, atau keputusan untuk mengadopsi. Terdapat 5 (lima) karakteristik inovasi, yang pertama, keunggulan relatif (*relative advantage*), hal ini dapat diukur dari beberapa segi, seperti segi ekonomi, prestise sosial, kenyamanan, kepuasan dan lain – lain. Yang penting adalah apakah seseorang menganggap inovasi tersebut menguntungkan. Semakin besar keunggulan relatif dirasakan oleh pengadopsi, semakin cepat inovasi tersebut dapat diadopsi. Kedua, kompatibilitas (*compatibility*), karakteristik ini beranggapan bahwa sebuah ide yang tidak kompatibel dengan nilai – nilai dan norma – norma sistem sosial tidak akan diadopsi secepat inovasi yang kompatibel. Adopsi inovasi yang tidak kompatibel sering membutuhkan penerapan sistem nilai baru sebelumnya. Ketiga, kerumitan (*complexity*), diartikan bahwa sejauh mana suatu inovasi dianggap sulit dipahami dan digunakan. Beberapa inovasi tertentu ada yang dengan mudah dapat dimengerti dan digunakan oleh pengadopsi dan ada pula yang sebaliknya. Secara umum, ide – ide baru yang lebih mudah dipahami akan diadopsi lebih cepat daripada inovasi yang mengharuskan pengguna untuk mengembangkan keterampilan dan pemahaman baru. Keempat, kemampuan diuji cobakan (*trialability*), suatu inovasi yang dapat diujicobakan dalam keadaan sesungguhnya

umumnya akan lebih cepat diadopsi. Jadi, agar dapat dengan cepat diadopsi, suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan keunggulannya. Terakhir, Kemampuan diamati (*observability*), adalah derajat hasil suatu inovasi dapat terlihat oleh orang lain. Semakin mudah seseorang melihat hasil dari suatu inovasi, semakin besar kemungkinan orang atau sekelompok orang tersebut mengadopsi.

Elemen pokok yang kedua yaitu saluran komunikasi. Saluran komunikasi adalah sarana yang digunakan untuk mengirim pesan dari orang ke orang lain. Sifat dari hubungan pertukaran informasi antara pasangan individu menentukan kondisi bagaimana sumber mengirimkan inovasi ke penerima beserta efeknya. Selanjutnya, jangka waktu, waktu adalah aspek yang jelas dari setiap proses komunikasi, dimensi waktu dalam proses difusi berpengaruh pada beberapa hal antara lain proses pengambilan keputusan, keinovatifan seseorang: relative lebih cepat atau lambat dalam menerima inovasi, dan kecepatan pengadopsian inovasi dalam sistem sosial. Yang terakhir, sistem sosial, didefinisikan sebagai seperangkat unit yang saling terkait yang terlibat dalam pemecahan masalah bersama untuk mencapai tujuan bersama. Anggota atau unit sistem sosial dapat berupa individu, kelompok informal, organisasi, dan/atau subsistem. Topik – topik yang dibahas antara lain bagaimana struktur sosial memengaruhi difusi, efek norma pada difusi, peran pemimpin opini dan agen perubahan, jenis keputusan inovasi, dan konsekuensi inovasi. Semua masalah ini melibatkan hubungan antara sistem sosial dan proses difusi yang terjadi di dalamnya.

Selanjutnya Rogers (1983) menambahkan proses pengambilan keputusan dalam inovasi. Proses ini terdiri dari serangkaian tindakan dan pilihan seorang

individu atau organisasi dalam mengevaluasi ide baru dan memutuskan untuk mengadopsi atau tidaknya sebuah inovasi. Proses pengambilan keputusan ini terdiri dari 5 (lima) tahap antara lain, (1) pengetahuan (*knowledge*), terjadi ketika seseorang mengerti dengan keberadaan inovasi dan memperoleh pemahaman tentang bagaimana fungsinya. (2) Persuasi (*persuasion*), terjadi ketika seorang individu membentuk sikap yang menguntungkan atau tidak terhadap inovasi. Persepsi yang selektif penting dalam menentukan perilaku individu. Atribut yang dirasakan seperti inovasi sebagai keunggulan relatif, kompatibilitas, dan kompleksitasnya sangat penting pada tahap ini. (3) Keputusan (*decision*), terjadi ketika seseorang terlibat dalam kegiatan yang mengarah pada pilihan untuk mengadopsi atau menolak inovasi. Adopsi berarti keputusan untuk menerima sepenuhnya inovasi. Sedangkan, penolakan adalah keputusan untuk tidak mengadopsi inovasi. Pada kenyataannya, kebanyakan individu tidak akan mengadopsi sebuah inovasi tanpa mencobanya terlebih dahulu untuk mengurangi rasa kecewa. (4) Implementasi (*implementation*), terjadi ketika seseorang memutuskan untuk menggunakan suatu inovasi. Implementasi merupakan tahap praktek yang akan berimbas pada perubahan perilaku. (5) Konfirmasi (*confirmation*), Penerimaan terhadap suatu inovasi oleh suatu masyarakat akan terjadi berbeda – beda sesuai dengan pengetahuan dan kesiapannya menerima hal tersebut. Selama tahap konfirmasi, individu akan berusaha menghindari keadaan ketidakcocokan. Namun, keputusan untuk menghentikan suatu inovasi yang sebelumnya sudah diadopsi juga dapat terjadi.

Studi – studi terdahulu yang menggunakan teori difusi inovasi dengan melihat penerapan inovasi kepada masyarakat telah banyak dilakukan sebelumnya. Salah satunya dilakukan oleh Indriana (2014) yang bertujuan mengkaji strategi komunikasi pemasaran sosial yang dilakukan oleh Koperasi Bank Sampah Malang (BSM) dalam rangka menyebarluaskan inovasi baru ini pada masyarakat Kota Malang. Fenomena ini berkesinambungan dengan teori difusi inovasi yang mengkaji tentang penyebaran atau distribusi suatu inovasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan dokumen yang mendukung untuk memberikan dan menjelaskan informasi mengenai strategi komunikasi yang digunakan Koperasi BSM. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa strategi komunikasi pemasaran sosial yang dilakukan oleh Koperasi BSM dalam menyebarluaskan program Bank Sampah di Kota Malang yaitu dilakukan oleh Koperasi BSM dalam menyebarluaskan program BSM yaitu dengan melakukan analisa situasi dan melakukan 8 tahap mengembangkan komunikasi yang efektif. Koperasi BSM menyusun pesan – pesan sedemikian rupa, yakni dengan menekankan manfaat – manfaat yang dapat diperoleh masyarakat jika mengadopsi program tersebut. Koperasi BSM mengoptimalkan saluran komunikasi personal untuk menjangkau masyarakat dan lebih mengindividualisasikan penyampaian pesan atau komunikasi yang dilakukan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Melida (2015) bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis strategi komunikasi pelaksana Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (BKBKS) Kota Samarinda dalam menyosialisasikan program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) kepada

remaja. Metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik analisis data Model Interaktif Miles dan Huberman. Teori dan konsep yang dipakai pada penelitian tersebut adalah teori difusi inovasi, strategi komunikasi, sosialisasi, media sosialisasi, komunikasi pembangunan, komunikasi tatap muka, komunikasi bermedia dan penyuluhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi pelaksana BKBKS Kota Samarinda dalam mensosialisasikan program PUP yaitu dengan menggunakan cara komunikasi tatap muka atau komunikasi *face to face* di bidang Keluarga Berencana (KB) selain itu juga menggunakan komunikasi bermedia di Bidang Penggerakan Keluarga dan Masyarakat (PKM).

Berbeda dengan Melida (2015), Istiati (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui difusi inovasi dalam kegiatan komunikasi pembangunan terhadap program Bantuan Bibit Gratis oleh Persemaian Permanen BPDASH SOP Yogyakarta pada masyarakat Desa Gading, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul. Dalam hal ini inovasi yang dimaksud adalah program bantuan bibit gratis sebagai bentuk transformasi nilai-nilai penghijauan. Metode penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah komunikasi pembangunan, difusi inovasi dan unsur-unsur utama inovasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transformasi nilai-nilai penghijauan dalam kegiatan komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh BPDASHL SOP pada program bantuan bibit gratis di masyarakat Desa Gading belum optimal. Ketidakmaksimalan upaya komunikasi yang dilakukan pihak Persemaian Permanen BPDASHL SOP dikarenakan kurangnya media yang mereka gunakan dalam menginformasikan program. Selain itu, kondisi masyarakat desa Gading

yang umumnya adalah petani menjadi salah satu faktor alasan untuk memanfaatkan lahan mereka untuk menanam pohon. Di samping itu, ketergantungan masyarakat yang besar terhadap pemimpin opini yang menjadikan umumnya masyarakat desa Gading masih kurang aktif dalam berinisiatif dalam memperoleh informasi yang berkembang. Dari beberapa kendala diatas, peneliti menilai Persemaian Permanen BPDASHL SOP sudah memiliki solusi efektif untuk realitas yang ditemui di masyarakat desa Gading. Hanya saja solusi ini belum efektif diinformasikan di masyarakat desa Gading secara merata.

Selanjutnya, Warnaen dkk (2016) melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji proses adopsi inovasi pada petani tanaman pangan di Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi pada petani di Kabupaten Takalar, khususnya di Kecamatan Polobangkeng Utara diawali dengan beberapa tahap, mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa difusi dari proses inovasi dan desain inovasi yang terjadi pada petani adalah satu arah yaitu dari peneliti atau pemangku kebijakan disebarkan oleh agen perubahan dan dipraktikkan oleh petani sehingga petani tidak dilibatkan dalam penciptaan sebuah inovasi.

Selain itu, Pratama (2016) melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa difusi inovasi program Jaminan Kesehatan Nasional dalam penelitian ini merupakan proses difusi inovasi dengan sistem difusi inovasi sentralik. Dimana pemerintah membuat sebuah inovasi berupa program Jaminan Kesehatan Nasional yang kemudian disebarkan dengan paket informasi yang sama kepada calon

adopter yang bertindak sebagai penerima pasif. Penelitian ini menggunakan wawancara dan observasi dalam pengumpulan data dengan metode kualitatif deskriptif.

Ahmad (2016) melakukan penelitian bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Komunitas Kuya Tilubelas dalam menyadarkan warga RW 13 Tamansari Bandung sebagai penghuni di sekitaran bantaran sungai Cikapundung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan model konseptual yang sedang disebarkan oleh komunitas kepada masyarakat RW 13 Tamansari yaitu berupa gagasan yang bernama gerakan Cikapundung bersih. Untuk mengkomunikasikan gagasan ini kepada masyarakat, komunitas menggunakan dua saluran komunikasi yaitu intrapersonal dan media massa untuk mempermudah masyarakat mencari informasi tentang gagasan gerakan tersebut. Dari hasil penelitian menunjukkan empat RT dapat menerima dan mengadaptasi gagasan yang disebarkan oleh komunitas, sementara tiga RT lainnya memilih untuk berhenti mengadopsi gerakan tersebut.

Sejalan dengan beberapa penelitian di atas, Suahya dan Surahman (2017) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi inovasi dalam mengembangkan program bank sampah Alam Lestari di Kota Serang, Kecamatan Serang, Provinsi Banten dalam memberdayakan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi dari strategi komunikasi pengelola bank sampah Alam Lestari dalam memberdayakan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi komunikasi pengelola bank sampah

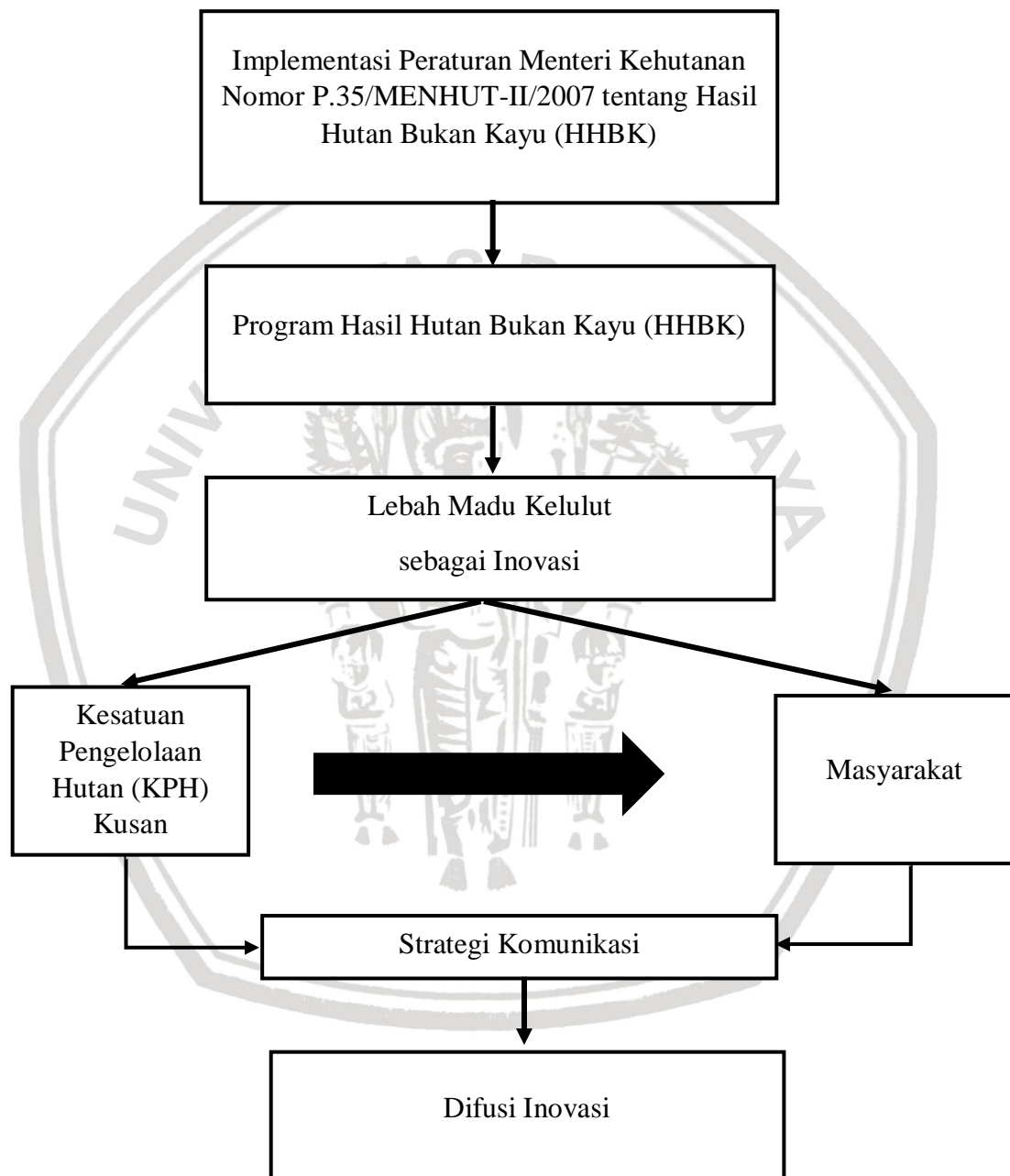
Alam Lestari dalam mengembangkan program bank sampah tidak cukup baik. Hal ini dikarenakan pembuatan strategi oleh pengelola belum menyentuh dan melibatkan masyarakat yang lebih luas lagi. Implementasi strategi komunikasi dari pengelola Bank Sampah Alam Lestari menggunakan beberapa media komunikasi seperti brosur, pamflet, pameran, dan lain – lain. Tetapi sebagian masyarakat tidak ikut berpartisipasi dalam lingkungan sosial, intensitas penggunaan media komunikasi dan proses adopsi tanpa komunikasi berkelanjutan.

Beberapa penelitian di atas menunjukkan bahwa tidak semua penelitian yang menggunakan teori difusi inovasi berfokus pada bagaimana inovasi diterapkan oleh adopter termasuk tahap – tahap penerapan inovasi, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat bagaimana inovasi tersebut disebarkan. Berdasarkan dua kecenderungan tersebut, penelitian ini mengikuti pandangan kedua yang memposisikan teori difusi inovasi untuk melihat bagaimana teori difusi inovasi digunakan untuk menyebarluaskan inovasi yang dalam hal ini adalah strategi KPH Kusan dalam menyebarluaskan inovasi dalam bentuk budidaya lebah madu kelulut pada masyarakat sekitar hutan. Pemilihan teori difusi inovasi dalam penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana proses adopsi inovasi dan karakteristik yang mempengaruhi kemungkinan suatu inovasi dapat diterima oleh para petani saat diberikan sebuah inovasi untuk pengembangan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang pada penelitian ini adalah program budidaya lebah madu kelulut. LittleJohn dan Foss dalam Agusta (2009) mengemukakan bahwa teori ini mampu memberikan ruang untuk masyarakat lokal untuk berperan serta dalam komunikasi pembangunan dan mampu mendukung proses modernisasi.

2.3 Kerangka Pemikiran

Peneliti berangkat dari fenomena empiris berupa penerapan kebijakan Kementerian kehutanan tentang pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan hutan yaitu melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/MENHUT-II/2007. Di dalam peraturan tersebut disebutkan tentang hak dan kewajiban Departemen Kehutanan untuk mengatur dan mengurus fungsi – fungsi dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Melalui Departemen Kehutanan peraturan ini didistribusikan nasional ke daerah – daerah seluruh Indonesia salah satunya pada Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya pada Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan (KPHP – Unit VI Tanah Bumbu ke Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti memilih). Salah satu program terbaru yang digerakkan oleh KPH Kusan adalah budidaya lebah madu kelulut (trigona) di sekitaran hutan. Program ini bertujuan untuk memberdayakan masyarakat sekitar hutan khususnya Desa Mantewe agar mampu menghasilkan hasil hutan yang bukan berasal dari kayu. Hal ini dikarenakan selama ini masyarakat sekitar hutan khususnya di Desa Mantewe bergantung pada hasil hutan kayu. Pada dasarnya budidaya lebah madu kelulut ini termasuk ke dalam sebuah inovasi bagi masyarakat desa karena sebelumnya belum pernah diperkenalkan. Oleh karena itu, menjadi menarik untuk melihat lebih jauh strategi komunikasi yang digunakan KPH Kusan dalam menyebarluaskan inovasi maka peneliti

menggunakan kerangka teori difusi inovasi untuk melihat strategi komunikasi itu dilakukan.



Bagan 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Diolah Peneliti



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Paradigma dan Jenis Penelitian

Manzilati (2017) menyebutkan paradigma utama dalam penelitian sosial terdiri atas empat kelompok besar yaitu positivistik, interpretatif, kritis, dan posmodern. Penelitian ini mengikuti paradigma interpretatif karena bertujuan untuk memahami kehidupan sosial dan menekankan makna serta pemahaman. Melalui paradigma interpretatif, penelitian ini bermaksud untuk melihat strategi yang digunakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan (KPHP – Unit VI Tanah Bumbu) dalam mengimplementasikan program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan tujuan menunjukkan adanya sesuatu yang dapat dipelajari dari suatu kasus. Moleong (2010) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain – lain. Denzin dan Lincoln (dalam Herdiansyah, 2010) menyebutkan penelitian kualitatif ditujukan untuk mendapatkan pemahaman yang mendasar melalui pengalaman langsung peneliti, maka dalam penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan dan harus mengenal subjek penelitian. Untuk mendukung penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif sehingga hanya memaparkan situasi atau peristiwa tentang bagaimana strategi yang digunakan KPH Kusan sebagai komunikator program dalam mengkomunikasikan program budidaya lebah madu kelulut.

Rakhmat (2009) menyebutkan penelitian deskriptif tidak mencari atau menjelaskan hubungan, tidak menguji hipotesis atau membuat prediksi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan (KPHP – Unit VI Tanah Bumbu) Provinsi Kalimantan Selatan untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan strategi komunikasi pembangunan yang digunakan KPH dalam mengimplementasikan program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) kepada masyarakat. Selain itu, peneliti juga akan turun ke lokasi pengimplementasian program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Desa Batulicin Kecamatan Batulicin untuk kelengkapan dokumentasi. Pemilihan lokasi penelitian dikarenakan Kabupaten Tanah Bumbu khususnya Desa Batulicin yang berada dibawah koordinasi KPH Kusan Unit VI merupakan salah satu daerah yang ikut serta mengimplementasikan pengembangan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK).

3.3 Fokus Penelitian

Sugiyono (2015) menyebutkan, batasan masalah untuk mempertajam penelitian dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus. Untuk mencapai fokus penelitian pada penelitian ini, maka peneliti mengacu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryani (2015) dengan hasil bahwa strategi komunikasi pelaksana Badan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Kota Samarinda menggunakan dua cara yaitu komunikasi tatap muka dan komunikasi bermedia. Pada penelitian tersebut aspek – aspek yang digunakan untuk menganalisis strategi

komunikasi antara lain saluran komunikasi, sasaran komunikasi, isi pesan, dan efek.

Berdasarkan penelitian tersebut, fokus pada penelitian ini meliputi:

1. Profil target adopter.
2. Alasan dan bagaimana pemilihan target adopter.
3. Analisis terhadap saluran komunikasi yang digunakan oleh KPH Kusan.
4. Analisis terhadap sasaran komunikasi yang dipilih sebagai penerima inovasi.
5. Analisis terhadap isi pesan yang disampaikan.
6. Analisis terhadap persepsi/penerimaan target adopter tentang inovasi dan strategi penyampaian.

3.4 Sumber Data

3.4.1 Data Primer

Waluya (2007) mendefinisikan data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui kata – kata dan tindakan orang – orang yang terlibat dalam pengkomunikasian strategi komunikasi pembangunan pada program budidaya lebah madu kelulut. Selanjutnya, data tersebut dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekaman *video / audio tapes*, dan pengambilan foto.

3.4.2 Data Sekunder

Keuntungan penggunaan data sekunder selain menambah kelengkapan data juga untuk menguji temuan – temuan yang didapat pada data primer. Data sekunder dibagi menjadi dua yaitu data sekunder pribadi dan data sekunder masyarakat

(Black dan Champion, 2009). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder masyarakat yang terdiri dari arsip data dan bahan lain yang dipublikasikan. Arsip data yang dimaksud adalah informasi yang dimiliki KPH Kusan tentang pengembangan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya budidaya lebah madu kelulut seperti catatan internal dan evaluasi program.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015) menyebutkan, jenis wawancara kategori *in-dept interview* dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Pemilihan jenis wawancara ini bertujuan untuk memahami suatu fenomena yang dalam penelitian ini adalah program budidaya lebah madu kelulut. Sejalan dengan ciri – ciri wawancara semi terstruktur yang dijelaskan Herdiansyah (2010), wawancara pada penelitian ini akan bersifat terbuka dan fleksibel yang berarti bahwa jawaban yang diberikan oleh narasumber tidak dibatasi namun tidak keluar dari konteks pembicaraan. Meskipun terdapat kebebasan tetapi waktu pelaksanaan wawancara masih dapat dikontrol agar tema pembicaraan tidak melebar ke arah yang tidak diperlukan. Maka dari itu, diperlukan pedoman wawancara yang dijadikan patokan ataupun kontrol dalam pembicaraan. Wawancara ini nantinya akan ditujukan kepada Kepala KPH Kusan, Penanggungjawab Program, petugas KPH Kusan, dan masyarakat terlibat langsung dalam pengimplementasian program.

3.6 Teknik Pemilihan Informan

Pawito (2007) menyebutkan bahwa teknik pemilihan informan atau sampel dalam penelitian kualitatif berbeda dengan kuantitatif, pada kualitatif lebih mendasarkan diri pada alasan atau pertimbangan – pertimbangan tertentu (*purposeful selection*) sesuai dengan tujuan penelitian. Oleh karena itu, sifat metode sampling dari penelitian kualitatif pada hakikatnya adalah *purposive sampling* atau tertuju kepada orang – orang terpilih. Selain itu, tidak menutup kemungkinan bahwa dalam menentukan sampling akan menggunakan teknik sampling bola salju, yang berarti peneliti dapat memilih informan lainnya untuk memperluas informasi sesuai kebutuhan peneliti (Moleong, 2010). Dalam penelitian ini, adapun kriteria – kriteria yang peneliti butuhkan antara lain:

1. Laki – Laki/Perempuan yang menjabat sebagai ketua/petugas KPH Kusan dan terlibat langsung dalam proses perencanaan strategi komunikasi pembangunan dalam mengimplementasikan program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sejak awal perencanaan hingga evaluasi kegiatan.
2. Laki – Laki/Perempuan yang menjabat sebagai ketua/petugas KPH Kusan dan terlibat langsung dalam proses pengimplementasian program budidaya lebah madu kelulut.
3. Bersedia menjadi informan dalam penelitian.

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini bersifat interaktif sesuai teori Miles, Huberman dan Saldana (2014), yaitu menganalisis data dengan tiga langkah antara lain kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kondensasi data, yaitu merujuk pada proses menyeleksi (*selecting*) informasi yang dapat dikumpulkan dan dianalisis, memfokuskan (*focusing*) data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian, merangkum (*abstracting*) data yang telah terkumpul khususnya yang berkaitan dengan kecukupan data, yang terakhir menyederhanakan dan mentransformasikan (*simplifying and transforming*) data dengan cara uraian singkat dan mengelompokkan data ke dalam suatu pola. Pada tahap kondensasi data ini peneliti akan mengumpulkan seluruh informasi yang berhubungan dengan strategi komunikasi KPH Kusan dalam upaya mengimplementasikan program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Selanjutnya, peneliti akan memfokuskan data berdasarkan rumusan masalah penelitian dan merangkumnya. Jika data yang menunjukkan strategi komunikasi sudah dirasa cukup, maka data tersebut dapat digunakan untuk menjawab masalah penelitian.

Penyajian data, bertujuan membantu dalam memahami apa yang terjadi dan menganalisis lebih mendalam data hasil observasi dan wawancara. Untuk mempermudah penyajian data pada penelitian ini, peneliti menggunakan penyajian data berupa tabel dan bagan untuk menggabungkan informasi yang didapat agar mudah dimengerti. Penarikan kesimpulan, berarti menyimpulkan data yang telah dianalisis dan diuji kebenarannya. Pada penelitian ini, simpulan tersebut meliputi

unsur – unsur strategi komunikasi pembangunan dan tingkat keberhasilan strategi komunikasi pembangunan yang dilakukan oleh KPH Kusan sebagai komunikator program.

3.8 Keabsahan Data

3.8.1 Kompetensi Subjek Riset

Informan yang menjadi subjek riset harus kredibel dan memiliki pengetahuan dan kecakapan di bidangnya. Hal ini bertujuan agar data yang didapatkan oleh peneliti menjadi kredibel (Kriyantono, 2006). Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan yang memiliki pengalaman langsung dalam program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya madu lebah kelulut.

3.8.2 Triangulasi Sumber

Pujileksono (2015) menjelaskan bahwa triangulasi data merupakan pendekatan metode yang dilakukan oleh peneliti pada saat mengumpulkan dan melakukan analisis data. Lebih lanjut Triangulasi merupakan gabungan atau kombinasi metode yang digunakan untuk mengkaji fenomena dari berbagai sudut pandang dan perspektif yang berbeda untuk memperoleh kebenaran tinggi.

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan triangulasi sumber data untuk menggali kebenaran data dan informasi melalui berbagai sumber data yang berbeda. Masing-masing narasumber akan memberikan pandangan yang memunculkan keluasan pengetahuan sehingga memperoleh kredibilitas.

3.8.3 Triangulasi Metode

Triangulasi metode merupakan salah satu langkah pengecekan keabsahan data temuan peneliti. Triangulasi metode dilakukan dengan dilakukan dengan cara

membandingkan informasi atau data yang diperoleh dengan metode yang berbeda-beda (Pujileksono, 2016).

Peneliti menggunakan lebih dari satu teknik pengumpulan data yakni melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi, kemudian mencocokkan hasil informasi atau data yang diperoleh untuk mendapatkan keabsahan data.

3.9 Etika Penelitian

Etika penelitian diperlukan untuk menciptakan suatu batas personal yang membatasi hak, kepentingan, dan menghindari adanya pelanggaran dalam konteks penelitian. Manusia (sebagai peneliti) meneliti manusia (sebagai subjek penelitian) haruslah dilandasi dengan etika penelitian yang kuat (Herdiansyah, 2013). Berdasarkan hal tersebut, maka dalam penelitian ini

1. Peneliti akan bersikap langsung, terbuka, dan jujur.
2. Melindungi privasi informan agar tidak terjadi pencemaran nama baik.
3. Melibatkan unsur kesukarelaan informan dalam memberikan data atau informasi.
4. Tidak menyudutkan informan dalam memberikan pertanyaan saat pelaksanaan wawancara.
5. Penulisan hasil penelitian murni berdasarkan data dan hasil wawancara yang diperoleh.



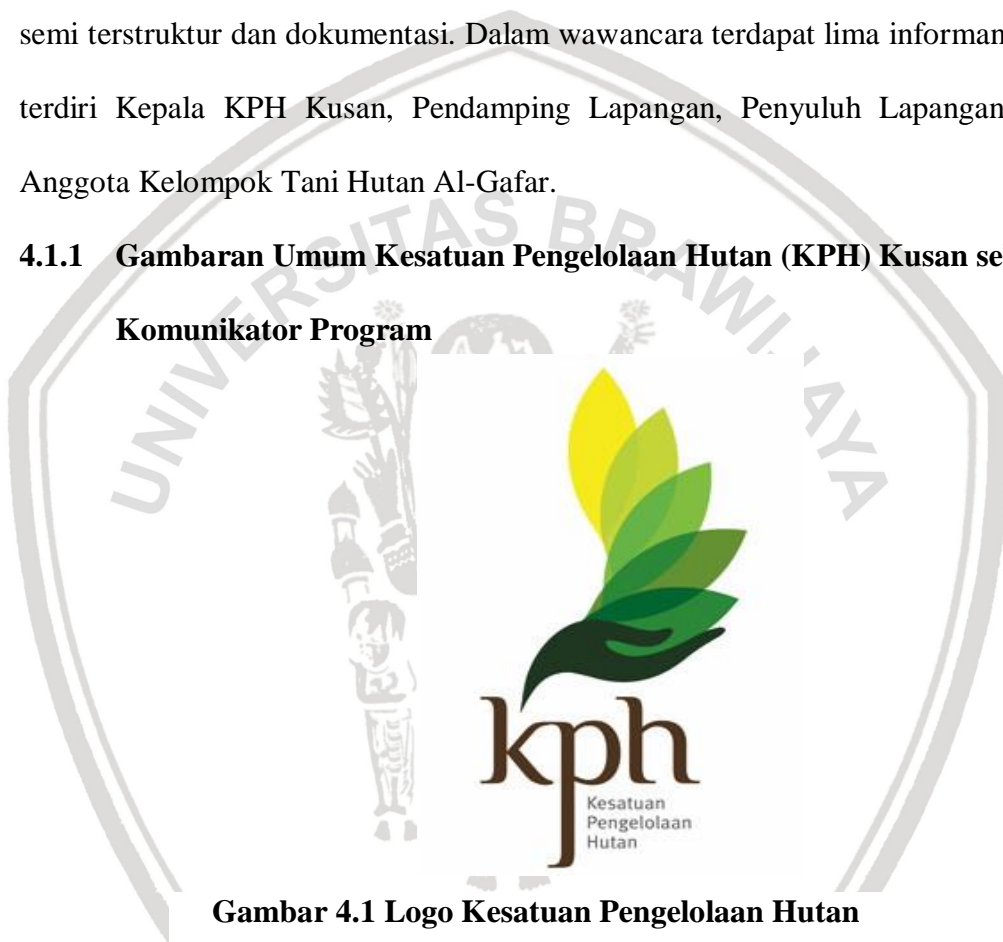
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Dalam wawancara terdapat lima informan yang terdiri Kepala KPH Kusan, Pendamping Lapangan, Penyuluh Lapangan, dan Anggota Kelompok Tani Hutan Al-Gafar.

4.1.1 Gambaran Umum Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan sebagai Komunikator Program



Gambar 4.1 Logo Kesatuan Pengelolaan Hutan
Sumber: Dokumen KPH Kusan

Berdasarkan Laporan Tahunan KPH Kusan tahun 2017, Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan (KPHP Unit VI-Tanah Bumbu) merupakan salah satu KPHP di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan khususnya di Kabupaten Tanah Bumbu. Kegiatan KPH Kusan mengacu/berlandaskan pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) periode tahun 2017-2026 yang telah disahkan oleh

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada awal tahun 2017 dan Rencana Operasional kegiatan (ROK) KPH Kusan Tahun 2017. Secara singkat, berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 023 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan tanggal 3 Maret 2017, KPH Kusan mempunyai tugas yaitu menyusun program, mengkoordinasikan, membina, mengatur, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan pengelolaan hutan secara terencana, terpadu dan lestari. Selain itu, KPH Kusan juga bertugas memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Hal ini sejalan dengan fungsi KPH Kusan yaitu sebagai pelaksana penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan dan pengendalian penyusunan rencana teknis pengelolaan hutan terencana, terpadu dan lestari.

KPH Kusan sebagai komunikator program pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) khususnya lebah madu kelulut membutuhkan bantuan dari luar. Pada pelaksanaannya KPH Kusan membutuhkan tim ahli di bidang madu sebagai komunikator untuk memberikan informasi yang jelas kepada Kelompok Tani Hutan (KTH) agar sasaran yang diinginkan mampu tercapai. Sedangkan peran KPH Kusan dalam program ini sebagai penyuluh dibidang penguatan kelembagaan (hasil wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018).

4.1.2 Gambaran Umum Program Usaha Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)

Program usaha pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di KPH Kusan mengacu pada Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) periode

2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada awal tahun 2016 dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) KPH Kusan tahun 2017. Kegiatan ini bergantung kepada pendanaan yang bersumber dari dua anggaran, yaitu APBD I (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dan APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya DIPA BPHP Wilayah IX Banjarbaru.

Berdasarkan data KPH Kusan pada situs *kph.or.id*, potensi hutan non kayu yang dimiliki KPH Kusan antara lain burung walet, madu lebah, kayu manis, kemiri dan gaharu. Potensi hutan non kayu tersebut selanjutnya dimanfaatkan untuk mewujudkan visi kehutanan di bidang HHBK yang berbunyi “Hasil Hutan Bukan Kayu, Produk Multimanfaat Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Ekosistem untuk Kesejahteraan Rakyat”.

Untuk menunjang keberhasilan program usaha pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) tersebut, KPH Kusan melaksanakan kegiatan pelatihan yang dalam penelitian ini adalah pelatihan budidaya lebah madu kelulut. Pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan masyarakat dalam melakukan budidaya lebah madu. Program ini berada dibawah tanggung jawab seksi pemanfaatan hutan. Sesuai PERGUB No. 023 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Pada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, seksi pemanfaatan hutan mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengamanan, pengendalian, dan pelestarian hutan.

Dalam pelaksanaannya, KPH membutuhkan bantuan masyarakat sebagai calon adopter program budidaya lebah madu kelulut, maka dari itu sebelum melaksanakan pelatihan KPH membentuk Kelompok Tani Hutan (KTH). Pembentukan KTH oleh KPH Kusan memiliki ketentuan antara lain: (1) paling sedikit terdiri dari 15 orang, (2) pelaku utama berdomisili dalam satu wilayah administrasi desa yang dibuktikan dengan kartu keluarga atau kartu tanda penduduk, (3) bersedia melakukan kegiatan pembangunan kehutanan atau usaha komoditas kehutanan yang sama, (4) difasilitasi oleh penyuluh kehutanan.

Panitia pelaksana dalam kegiatan ini adalah Badan Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) bekerjasama dengan Dinas Kehutanan Provinsi dan/atau KPHP yang dituangkan dalam SK Kepala BPHP Pelaksana pelatihan dilakukan setelah berkoordinasi dengan Balai Diklat Kehutanan (BDK), instansi dan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan kebutuhan narasumber dan materi yang akan disampaikan dalam pelatihan. Narasumber utama adalah praktisi dari Himpunan Petani Lebah Madu Tanah Laut (HIPMATALA), Pelaihari.

Kegiatan pelatihan pada program ini dilaksanakan pada bulan Agustus 2017 pada Kelompok Tani Hutan (KTH) lebah madu, yaitu KTH Al – Gafar Desa Batulicin Kecamatan Batulicin. Pelaksanaan kegiatan pelatihan dilakukan masing – masing selama tiga hari, terdiri dari pemberian materi secara teori dan praktik lapangan. Materi disampaikan langsung oleh instruktur yang merupakan pelaku usaha dan atau praktisi usaha lebah madu kelulut. *Output* kegiatan pelatihan adalah adanya peningkatan pengetahuan dan kapasitas teknis anggota KTH tentang budidaya lebah madu. Dalam konteks KPH, masyarakat memperoleh ruang untuk

menjalankan usaha sendiri dan KPH menempatkan diri sebagai salah satu pemegang saham.

Pemilihan lebah kelulut sebagai sasaran budidaya dikarenakan pemeliharaannya mudah, tidak memerlukan tempat khusus, modal kecil, hasil lebih besar dibanding lebah apis dan pemasarannya mudah. Selain itu, madu lebah kelulut kaya akan manfaat antara lain untuk meningkatkan metabolisme tubuh, menjaga kecantikan, menguatkan wanita yang baru bersalin dan menyembuhkan berbagai penyakit serta luka dalam.

4.1.3 Profil Informan

Berikut ini merupakan profil masing – masing informan dalam penelitian ini:

1. Syafriani

Syafriani merupakan Aparat Sipil Negara (ASN) yang menjabat sebagai Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan Kabupaten Tanah Bumbu sejak tahun 2017 hingga sekarang. Dalam program ini Syafriani berperan sebagai penanggungjawab setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh KPH Kusan.

2. Mushawir

Mushawir juga merupakan Aparat Sipil Negara (ASN) dan salah satu penyuluh kehutanan pertama yang bertugas aktif dilapangan sebagai jembatan antara KPH dengan para Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pelaksanaan program dan menangani masalah seputar keanggotaan di program budidaya lebah madu kelulut.

3. Rishawan

Rishawan merupakan salah satu pelopor Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) yang ada di wilayah kerja KPH Kusan. Ia juga bertugas membantu menyukseskan program – program kerja Perhutanan Sosial yang ada di KPH Kusan. Untuk program budidaya lebah madu kelulut khususnya di Desa Mantewe, ia bertugas sebagai penanggungjawab lapangan dibawah pengawasan seksi bidang pemanfaatan KPH Kusan.

4. Ayu Marianti

Ayu merupakan salah satu masyarakat Desa Batulicin Kecamatan Batulicin sekaligus anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Al – Gafar. Pada program ini Ayu bertugas memantau kesehatan setiap stupa lebah madu agar terhindar dari hama atau gangguan dari luar yang dapat mengancam lebah madu kelulut hingga musim panennya tiba. Tugas tersebut diberikan langsung oleh penyuluh lapangan dan berlaku untuk semua anggota KTH.

5. Karmila

Sama dengan Ayu, Karmila merupakan salah satu masyarakat Desa Batulicin sekaligus anggota Kelompok Tani Hutan (KTH) Al – Gafar. Karmila bersama Ayu dan anggota kelompok tani lainnya bekerjasama menyukseskan program budidaya lebah madu hingga saat ini.

4.2 Penyajian Data

Pada sub bab ini, peneliti mendeskripsikan hasil temuan peneliti di lapangan. Peneliti telah melakukan proses turun lapang dengan melalui metode pengumpulan data yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sesuai dengan yang diuraikan Miles, Huberman dan Saldana (2014), pada penelitian ini data diolah dengan melakukan pengumpulan data, selanjutnya diseleksi sesuai dengan fokus penelitian, disajikan dalam bentuk uraian singkat ataupun tabel, dan diakhiri dengan penyimpulan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data, peneliti melakukan kategorisasi data dengan mengelompokkan data yang memiliki persamaan ke dalam beberapa tema. Adapun hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dikategorisasikan sebagai berikut.

4.2.1 Persepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan tentang Program Budidaya Lebah Madu Kelulut

Perspektif Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan mengenai program budidaya lebah madu kelulut dapat dilihat dari penggalian data tentang pemahaman mengenai tujuan, mekanisme pelaksanaan program, dan unsur – unsur yang mempengaruhi inovasi. Berdasarkan penggalian data dokumen ditemukan bahwa arah, tujuan, dan sasaran pembangunan provinsi dan kabupaten serta memperhatikan kondisi, potensi dan permasalahan di dalamnya, Rencana Pengelolaan KPHP Unit VI – Tanah Bumbu memiliki visi “terwujudnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan secara lestari dan berkelanjutan untuk mendukung masyarakat sejahtera”. Salah satu kegiatan guna mendukung

keberhasilan pengelolaan hutan pada KPHP Tanah Bumbu, KPH Kusan melaksanakan program budidaya lebah madu kelulut yang diselenggarakan berdasarkan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) periode 2017 – 2026 yang telah disahkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI pada awal tahun 2016 dan Rencana Operasional Kegiatan (ROK) KPH Kusan tahun 2017 yang bertujuan mendukung program “revolusi hijau” yang dicanangkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama periode 10 tahun yang meliputi penanaman, pemeliharaan, hingga evaluasi di wilayah KPHP Tanah Bumbu. (Laporan Tahunan 2017 KPH Kusan)

Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Syafriani selaku Kepala KPH Kusan, bahwa program budidaya lebah madu kelulut bertujuan menjadi salah satu bentuk implementasi dari KPH Kusan selaku pengelola hutan untuk ikut menyukseskan kebijakan pemerintah tentang Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) sesuai undang – undang. Berikut kutipan wawancara dengan Syafriani.

“Program ini adalah sebenarnya program dari pemerintah sudah di setting pemerintah. Tujuannya salah satunya untuk ikut menyukseskan program HHBK dari pemerintah. Pemerintah kan ada undang – undang nya tentang HHBK nah ini salah satu bentuk implementasinya dari kusan.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Selain itu, pelatihan budidaya lebah madu ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan mempersiapkan masyarakat dalam melakukan budidaya lebah madu. Berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping lapangan dan Kepala KPH Kusan ditemukan bahwa secara garis besar program ini bertujuan menambah nilai ekonomi dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Hal ini didukung dengan pernyataan dari informan berikut.

“...masyarakat agar bisa mendapatkan nilai perekonomian tambah dari lebah madu. Hubungan dengan masyarakatnya baik. Dan masyarakat menyambut baik karena dengan program ini untuk menambah perekonomian masyarakat setempat.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

“Selain itu disini kami juga agar masyarakat hutan menjadi sejahtera dengan menambah penghasilan mereka disana.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Selain tujuan tersebut, berdasarkan hasil penggalan data melalui wawancara, ditemukan pula bahwa program ini bersifat terbuka atau tidak ada paksaan dari pihak KPH seperti yang disampaikan oleh Mushawir. Hal ini dimaksudkan agar stupa lebah yang nantinya diberikan dapat dirawat dengan benar oleh Kelompok Tani Hutan (KTH).

“Dari awal sudah dijelaskan jika anda tidak berminat ya tidak apa – apa. Karena takutnya nanti saat sudah *dropping* malah tidak dirawat.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Dalam pelaksanaannya, Rishawan menyebutkan bahwa ada beberapa persiapan yang dilakukan mulai dari pendataan komunitas sampai pada cara budidaya yang benar. Hal ini dilengkapi juga dengan upaya identifikasi daerah sasaran yang dianggap potensial seperti yang disebutkan oleh Mushawir. Identifikasi tersebut bertujuan melihat lahan yang cocok untuk menanam bunga – bunga sebagai pakan dari lebah madu kelulut. Berikut kutipan wawancara dengan kedua informan.

“Kalo untuk persiapannya sebelum pelaksanaan otomatis komunitas itu didata, dibuatkan kekelompokan, dibuatkan aturan mainnya, selanjutnya diberikan pelatihan peningkatan SDM, cara budidaya yang benar agar keberhasilannya tidak luput.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

“Pertama – tama kita adakan identifikasi dulu contohnya misal di Kelurahan Batulicin. Kita identifikasi dulu di daerah itu apa yang potensial. Kalau kita

ingin menanam pohon kan lahan daerah sana tidak cukup jadi dipilih program HHBK ini karena tidak memerlukan tempat yang luas yang penting ada lahan untuk menanam sejenis bunga – bunga sebagai pakan.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Mushawir menambahkan secara keseluruhan ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh KPH Kusan dalam pelaksanaan budidaya lebah madu kelulut yaitu mulai dari melakukan identifikasi daerah yang potensial, memperkenalkan lebah madu kelulut, berusaha menarik minat masyarakat, melaksanakan sosialisasi mulai dari pengenalan sampai pemasaran, menginformasikan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagai penyedia alat, dan sampai pada melakukan pendampingan dalam proses produksi serta memfasilitasi botol sebagai tempat madu dan izin ke berbagai dinas terkait. berikut kutipan wawancaranya.

“... Setelah identifikasi kita lakukan ada semacam sosialisasi ke kelompok tani bahwa ini ada bantuan dari ini terus masyarakatnya ini. Lalu sambil komunikasi kita menarik informasi dari dia apakah dia ada minat pada madu kelulut. Setelah itu, jika dia sudah setuju kita berikan lagi semacam sosialisasi tentang madu kelulut dari penyuluh mulai dari pengenalan sampai budidaya dan terakhir pemasaran dan lain – lain. Setelah itu kita komunikasikan ke BPHP sebagai penyedia. Setelah bantuan turun tidak mungkin kan kita langsung tinggalkan lalu kita sosialisasikan lagi untuk pemeliharaan di lapangan dalam bentuk FGD, dimulai dari penguatan kelembagaan pengenalan jenis – jenis HHBK dan lain – lain. Setelah itu juga tidak kita lepas, kita bantu dalam produksi sampai hasil dan kita fasilitasi untuk botol tempat madu sebagai pemasaran, kita bantu juga izin halal, izin industri rumah tangga dan keberbagai dinas – dinas terkait.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa informan di atas bahwa, program ini secara garis besar memperkenalkan teknik budidaya lebah madu yang berbeda dari biasanya sehingga program ini berkaitan dengan hal – hal baru. Maka dari itu program ini dapat dikatakan menjadi sebuah inovasi bagi masyarakat Desa Batulicin khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH) karena baru pertama kali

diperkenalkan. Hal ini berdasarkan dari kondisi masyarakat sekitar yang berlatar belakang bukan petani lebah madu kelulut. Rishawan menyebutkan bahwa masyarakat Desa Batulicin sebagian besar adalah perantau yang bekerja menjadi pendulang emas, petani dan peternak.

“Kalo penghasilannya disana kan macam – macam ada yang dari pendulang emas, ada petani, ada yang beternak bukan khusus. Daerah yang kita letakkan stup itu daerah perantau para pendatang yang sudah menetap jadi penduduk situ.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

Sedangkan Syafriani menyampaikan jawaban yang berbeda tentang kondisi masyarakat Desa Batulicin. Dia menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Desa Batulicin berpenghasilan sebagai petani lebah madu alam. Namun, karena lebah madu alam berbeda dengan lebah madu kelulut maka dari itu masyarakat menyambut baik program tersebut.

“Disana mereka itu sebagian besar petani lebah madu alam. Sebenarnya mereka sangat merespon karena dalam artian program ini bisa diletakkan di depan sini (rumah) stupanya. Karena selama ini kan mereka mengambil di hutan sekitar.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Informasi berbeda disampaikan oleh Mushawir, ia menyatakan bahwa program ini dapat dikatakan sebagai sebuah inovasi karena sebelumnya belum ada peraturan yang mengikat antara masyarakat dengan pemerintah/perusahaan dalam kegiatan kehutanan. Namun program budidaya lebah madu kelulut menjadi inovasi bagi sebagian masyarakat Desa Batulicin saja karena sebagian masyarakat lainnya sudah pernah mengetahui dan melaksanakan budidaya lebah madu kelulut di Kabupaten lain.

“Iya bisa dikatakan ini inovasi karena sebelumnya belum ada peraturan yang detail mengenai kemitraan dengan masyarakat, dulunya sering ada hal – hal demikian, bahwa masyarakat dilibatkan dalam kegiatan kehutanan bersama perusahaan, tapi mungkin aturan – aturannya yang belum kuat dan mengikat sehingga banyak yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kalo kelulut, sebagian sudah pernah di lain tempat, beda kabupaten. Tapi kebanyakan mereka baru pertama kali membudidayakan kelulut”
(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Berdasarkan paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa secara garis besar program budidaya lebah madu kelulut merupakan salah satu bentuk keikutsertaan KPH Kusan dalam mengimplementasikan program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diselenggarakan pemerintah. Selain itu, tujuan dari program budidaya lebah madu kelulut adalah untuk menambah nilai ekonomi dan menyejahterakan masyarakat sekitar hutan. Program ini bersifat terbuka atau tidak ada paksaan dari KPH agar stupa lebah yang nantinya diberikan mampu dirawat dengan baik. Secara keseluruhan, KPH Kusan melewati beberapa tahapan dalam pelaksanaan program budidaya lebah madu kelulut yaitu mulai dari identifikasi daerah yang potensial sampai pada memfasilitasi botol dan izin ke berbagai dinas terkait. Program ini dapat dikategorikan sebagai inovasi karena baru pertama kali diperkenalkan bagi masyarakat Desa Batulicin berdasarkan latar belakang sumber penghasilan masyarakat, mampu sebagai nilai tambah ekonomi bagi masyarakat, dan adanya peraturan baru dari KPH Kusan.

**Tabel 4.1 Temuan Kunci Persepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan
tentang Program Budidaya Lebah Madu Kelulut**

No	Informan	Temuan Kunci		
		Pemahaman tentang tujuan	Pemahaman tentang mekanisme	Unsur – unsur yang mempengaruhi inovasi
1.	Syafriani	<ul style="list-style-type: none"> Bertujuan menyukseskan kebijakan pemerintah tentang program HHBK Bertujuan menyejahterakan masyarakat sekitar dengan menambah penghasilan tambahan 	<ul style="list-style-type: none"> Program yang berasal dan sudah di setting pemerintah 	<ul style="list-style-type: none"> Sebagian masyarakat Desa Batulicin berpenghasilan sebagai petani lebah
2.	Rishawan	<ul style="list-style-type: none"> Bertujuan agar masyarakat mendapatkan nilai perekonomian tambah 	<ul style="list-style-type: none"> Beberapa persiapan yang dilakukan sebelum pelaksanaan antara lain pendataan komunitas, pembuatan kelompok dan aturan main, pelatihan peningkatan SDM, sampai pada cara budidaya yang benar 	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat Desa Batulicin sebagian besar adalah perantau yang bekerja menjadi pendulang emas, petani dan peternak.
3.	Mushawir		<ul style="list-style-type: none"> Bersifat terbuka atau tidak ada paksaan dari KPH Secara keseluruhan ada beberapa 	<ul style="list-style-type: none"> karena sebelumnya belum ada peraturan yang mengikat antara

			<p>tahapan yaitu yaitu mulai dari melakukan identifikasi daerah yang potensial, memperkenalkan lebah madu kelulut, berusaha menarik minat masyarakat, melaksanakan sosialisasi mulai dari pengenalan sampai pemasaran, menginformasikan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagai penyedia alat, dan sampai pada melakukan pendampingan dalam proses produksi serta memfasilitasi botol sebagai tempat madu dan izin ke berbagai dinas terkait</p>	<p>masyarakat dengan pemerintah atau perusahaan dalam kegiatan kehutanan</p>
--	--	--	---	--

4.2.2 Upaya Pengkomunikasian Program oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan

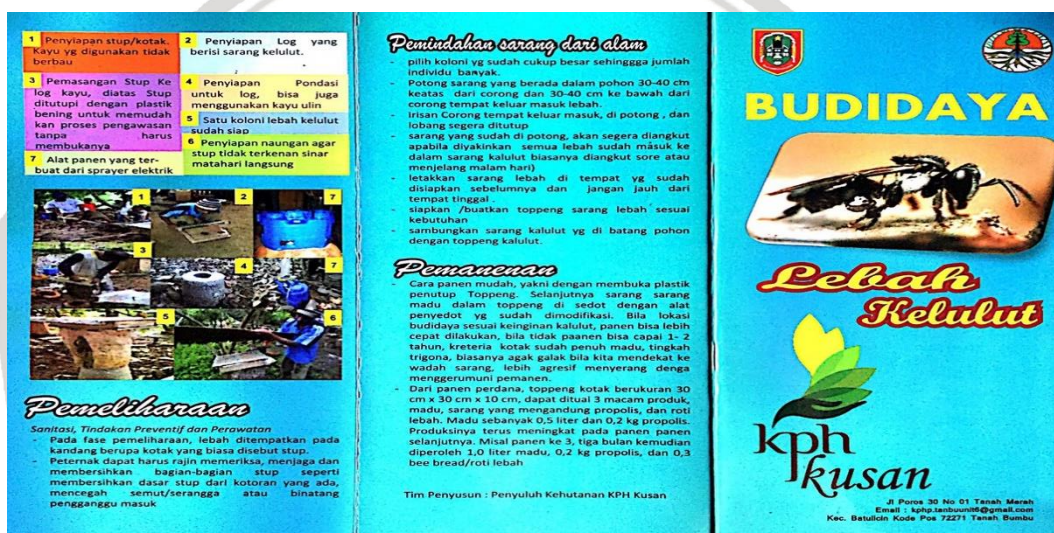
a. Sosialisasi untuk Memperkenalkan Program

Sebelum melaksanakan sosialisasi dalam bentuk FGD, KPH Kusan terlebih dahulu melaksanakan sosialisasi dalam bentuk tatap muka atau *door to door* untuk memperkenalkan program sekaligus mengidentifikasi daerah sasaran. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan syafriani dalam wawancara.

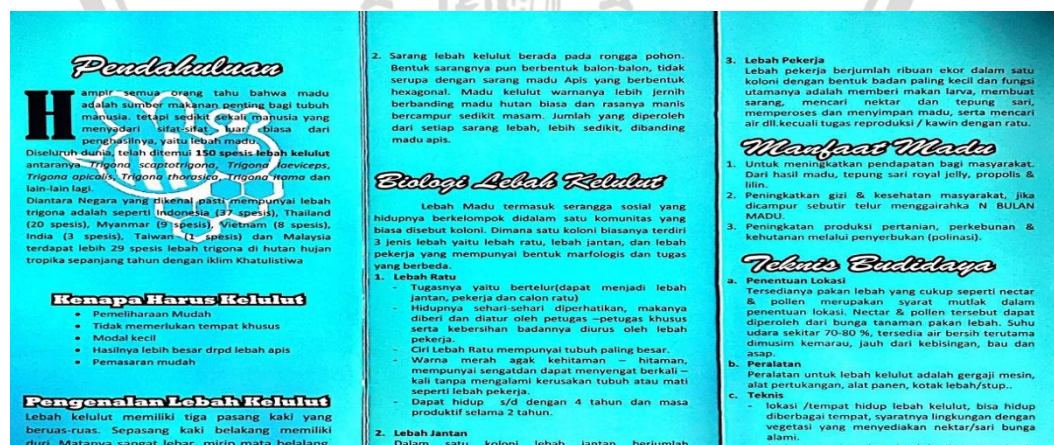
“Ada, kita dari rumah ke rumah. Kita kan penyuluhan ada dua, ada penyuluhan berkelompok ada juga penyuluh perorangan.”
(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Mushawir menambahkan, selain tatap muka dalam pelaksanaannya KPH Kusan juga membagikan brosur kepada masyarakat sebagai salah satu media penunjang dalam memperkenalkan program lebah madu kelulut.

“Yang pasti *face to face*. Lalu brosur kita bagikan saat penyuluhan.”
(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)



Gambar 4.2 Tampilan Tampak Depan Brosur Budidaya Lebah Kelulut
Sumber: Dokumen KPH Kusan



Gambar 4.3 Tampilan Tampak Belakang Brosur Budidaya Lebah Kelulut
Sumber: Dokumen KPH Kusan

Dalam upaya memperkenalkan program, brosur tersebut berisi penjelasan singkat tentang pengenalan lebah madu kelulut, manfaat madu, teknis budidaya, pemeliharaan dan pemanenan. Penjelasan lebih lengkap tentang beberapa aspek tersebut nantinya akan disampaikan saat sosialisasi dalam bentuk FGD.

Rishawan menyebutkan, pesan yang disampaikan saat memperkenalkan program ini antara lain memaparkan latar belakang program dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan bersedia mengadopsi program. Sedangkan Syafriani menyebutkan, pada pengenalan program KPH memaparkan tentang keunggulan madu yang sebetulnya sudah tersedia tinggal bagaimana mengembangkannya.

“Sebelum memberikan sesuatu kita tunjukkan latar belakang. Awal itu kan sudah diutarakan lebih dulu. Awalnya demikian latar belakangnya demikian agar masyarakat juga mengerti dan mau.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

“Salah satunya mengatakan bahwa ini program HHBK yang sebetulnya madu itu sudah ada dimana – mana tinggal seperti apa mengembangkannya.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Mushawir menyebutkan bahwa pada tahap ini yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain tim dari KPH yang meliputi pejabat, penyuluh, dan bakti rimbawan. Selain itu juga kepala Resort Pengelolaan Hutan (RPH) dan masyarakat sekitar yang menjadi sasaran.

“Biasanya tim dari KPH (pejabat, bakrim,dll), kepala RPH setempat, masyarakat setempat, KTH”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Mushawir menyebutkan bahwa identifikasi terhadap minat calon adopter pada lebah madu kelulut dilakukan sembari sosialisasi ke kelompok tani hutan. Hal ini bertujuan agar stupa lebah yang nantinya diberikan akan dirawat dengan baik, mengingat tidak adanya paksaan dari KPH kepada kelompok tani hutan.

“... Setelah identifikasi kita lakukan ada semacam sosialisasi ke kelompok tani bahwa ini ada bantuan dari ini terus masyarakatnya ini. Lalu sambil komunikasi kita menarik informasi dari dia apakah dia ada minat pada madu kelulut.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi untuk memperkenalkan program merupakan sosialisasi tahap pertama sebelum FGD. Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah sasaran sekaligus mencari tahu tentang minat masyarakat kepada program budidaya lebah madu kelulut. Mereka yang tertarik pada program budidaya lebah madu kelulut nantinya akan diberikan sosialisasi lagi untuk meneguhkan keputusan masyarakat dalam mengadopsi program dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*).

Selain tatap muka, KPH Kusan juga membagikan brosur kepada masyarakat sebagai satu satu media penunjang. Desain pesan yang disampaikan pada sosialisasi ini antara lain memaparkan latar belakang program dan keunggulan

lebih madu kelulut. Aktor yang terlibat dalam pelaksanaannya antara lain tim dari KPH, kepala RPH dan masyarakat.

b. *Focus Group Discussion* (FGD) untuk Penguatan Keputusan Masyarakat

Tahap selanjutnya dari sosialisasi pengenalan program adalah sosialisasi untuk penguatan keputusan masyarakat yang bertujuan meneguhkan keputusan masyarakat dalam mengadopsi program. Mushawir menyebutkan salah satu cara untuk meyakinkan masyarakat adalah dengan selalu menyampaikan pesan – pesan positif tentang program yang dijalankan kepada masyarakat hutan.

“Tiap face to face dimanapun pasti kita selalu bawa pesan – pesan tentang program kehutanan di masyarakat hutan. Kita selalu menyampaikan hal – hal positif tentang berbagai program yang dijalankan.”
(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Dalam pelaksanaannya, Mushawir dan Syafriani menyampaikan bahwa bentuk sosialisasi program dari KPH adalah dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) atau diskusi kelompok. Bentuk sosialisasi ini dianggap mampu sebagai jembatan antara KPH dengan masyarakat dalam menyukseskan terciptanya komunikasi yang efektif. Seperti yang dikatakan oleh Mushawir, diskusi kelompok dalam bentuk ini membantu sebagai pembatas masalah pada setiap pertemuan.

“Karena FGD ini bentuknya diskusi kelompok yang sudah terarah, jadi misalkan FGD nya madu maka yang dibahas hanya madu saja, mulai dari latar belakang program sampai cara budidaya madu dan pemasarannya.”
(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

“Kalau yang FGD biasanya untuk orang yang sangat baru. Madunya, stupnya baru dikasih, belum pernah dengar madu. Karena FGD ada beberapa tingkatan, pertama pengenalan, kemudian pematapan kelompok, berbicara pasar dan kemitraan.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Mushawir menyebutkan, pihak – pihak yang diundang saat FGD antara lain perangkat desa dan tokoh masyarakat. Sedangkan untuk pemateri selain dari pihak Pemerintah Provinsi, KPH juga mengundang narasumber yang ahli dalam bidang lebah.

“Tentu saja KTH yang berada di kawasan hutan dan sekitarnya yang kita tuju, kemudian perangkat desa dan tokoh masyarakat. kalau untuk pemateri selain dari pihak pemprov, juga mengundang narasumber yang mengetahui atau ahli dalam bidang tersebut.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Berdasarkan dokumen ditemukan bahwa saat pelaksanaan sosialisasi KPH Kusan dibantu oleh Dinas Kehutanan dan praktisi dari Himpunan Petani Lebah Madu Tanah Laut (HIPMATALA) untuk bimbingan teknis. Hal ini sejalan dengan yang dijelaskan Syafriani bahwa KPH membutuhkan bantuan dari luar kantor sebagai penunjang keberhasilan program.

“Kalau komunikatornya sementara ini kan di KPH memang susah jika mengandalkan staf ahli saja karena mereka yang kerja di Pelaihari, ada yang di Barabai juga. Karena barang – barang seperti itu susah, penyuluh pun tidak menguasai kecuali bekerjanya di madu. Jadi harus orang yang benar – benar paham. Jangan sampai mereka memahami tapi justru sasaran yang kita capai tidak ada.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Untuk mencapai hasil yang diinginkan saat sosialisasi, diperlukan desain pesan yang mampu menarik minat masyarakat. Syafriani menyatakan bahwa dalam penyampaian desain pesan lebih menonjolkan kualitas lebah yang nantinya akan berpengaruh pada harga. Sedangkan, Rishawan menyatakan pesan

yang disampaikan mengandung tujuan budidaya yaitu untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Secara keseluruhan pernyataan dari Syafriani dan Rishawan mengandung makna yang sama yaitu menonjolkan keunggulan lebah madu kelulut.

“Salah satunya adalah bahwa madunya itu adalah HHBK yang sebetulnya hampir ada diseluruh wilayah. Kita sampaikan bahwa madu itu berbeda harga berbeda model, lalu diletakkannya berbeda tempat, nah itu yang penting bagi petani. Jangan sampai begitu mereka tau madu harganya dua ribu per botol punya orang kenapa jadi sepuluh ribu. Oh ternyata memang beda. Punya dia mungkin agak asem – asem karena makannya bunga – bunga rawa sedangkan punya orang makannya bunga – bunga yang baik yang harum makanya mutunya lebih bagus. Karena madu itu sasarannya ke mutu bukan ke jumlah.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

“Ada, kaya tadi. Sesuatu yang diberikan ke masyarakat kan harus ada pesannya mbak harus dijaga bagus – bagus agar hasilnya meningkat bisa dikembangkan dengan yang lain. Semuanya kan dikasih stup 50 otomatis kalo dibudidayakan dengan baik kan berkembang. Pesan beliau itu selalu bagus mbak karena untuk perkembangan perekonomian masyarakat itu sendiri bukan sistem bisnis. Meskipun akan dipersaingkan dengan yang lain.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

Berdasarkan hasil temuan dokumen, penyuluh di lapangan menyajikan beberapa materi pelatihan berupa *powerpoint* sebagai penunjang pemahaman masyarakat. *Powerpoint* yang disajikan antara lain tentang kebijakan pemerintah tentang HHBK, penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), peran KPH dalam pengembangan HHBK, peran KTH dalam perlindungan hutan, analisa usaha dan peralatan budidaya, pengenalan koloni dan biologi kelulut, budidaya kelulut dan pemanenan dan budidaya lebah madu. Penyampaian materi *Powerpoint* tersebut disajikan secara terpisah dan

bertahap agar menghasilkan pemahaman yang maksimal seperti yang disampaikan oleh Syafriani.

“Cuma agar kelompok – kelompok itu lebih memahami makanya kita pisah – pisah. Misalnya hari ini kita pemanfaatan kelompok saja dulu sampai mereka tahu bahwa yang berkelompok itu lebih baik daripada perseorangan”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Berdasarkan susunan *Powerpoint* yang disajikan oleh penyuluh lapangan, peneliti melihat bahwa penyajian materi pelatihan disajikan secara be urutan mulai dari menjelaskan peraturan pemerintah hingga cara budidaya lebah madu kelulut dan dilanjutkan dengan praktik budidaya di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara, untuk menghasilkan pemahaman yang diinginkan, penyuluh lapangan membagi FGD menjadi dua hari. Pada hari pertama materi yang disampaikan meliputi penguatan kelembagaan kelompok tani hutan, peran KPH dalam pengembangan HHBK, dan analisa usaha dan pemasaran. Sedangkan hari kedua materi yang disampaikan meliputi biologi lebah, budidaya lebah madu, cara beternak lebah kelulut, peralatan budidaya dan panen & pasca panen lebah madu kelulut. Berikut adalah beberapa *Powerpoint* materi pelatihan yang disajikan saat sosialisasi.



Gambar 4.4 Powerpoint Penguatan Lembaga Kelompok Tani Hutan (KTH)
Sumber: Dokumen KPH Kusan

Pada pelaksanaan FGD pertama, penyuluh lapangan menyampaikan tentang penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) sebagai materi awal karena sesuai prosedur kegiatan pembentukan Kelompok Tani Hutan dilaksanakan sebelum kegiatan berjalan. Selain bertujuan sebagai pembentukan kelompok tani hutan, materi penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH) bertujuan agar adanya bukti konkret bahwa masyarakat resmi menjadi anggota KTH. Isi materi *powerpoint* tersebut meliputi penjelasan singkat tentang tugas dan fungsi KTH, ketentuan pembentukan KTH, penyusunan rencana KTH, dan penjelasan tentang buku – buku sebagai administrasi KTH.



Gambar 4.5 Powerpoint Peran KPH dalam Pengembangan HHBK
Sumber: Dokumen KPH Kusan

Selanjutnya, materi kedua yang disampaikan oleh penyuluh lapangan adalah materi peran KPH dalam pengembangan HHBK. *Powerpoint* tersebut berisi tentang manfaat KPH, peran KPH dalam pembangunan berkelanjutan dan bagi masyarakat serta terhadap pengembangan HHBK. Selain itu, juga berisi dasar hukum yang melatarbelakangi program pengembangan HHBK dan berisi contoh – contoh HHBK yang sudah dilaksanakan oleh KPH. Tujuan penyampaian materi ini sebagai bahan pengenalan kepada masyarakat tentang program HHBK yang nantinya akan dilaksanakan.



Gambar 4.6 Powerpoint Analisa Usaha dan Pemasaran
Sumber: Dokumen KPH Kusan

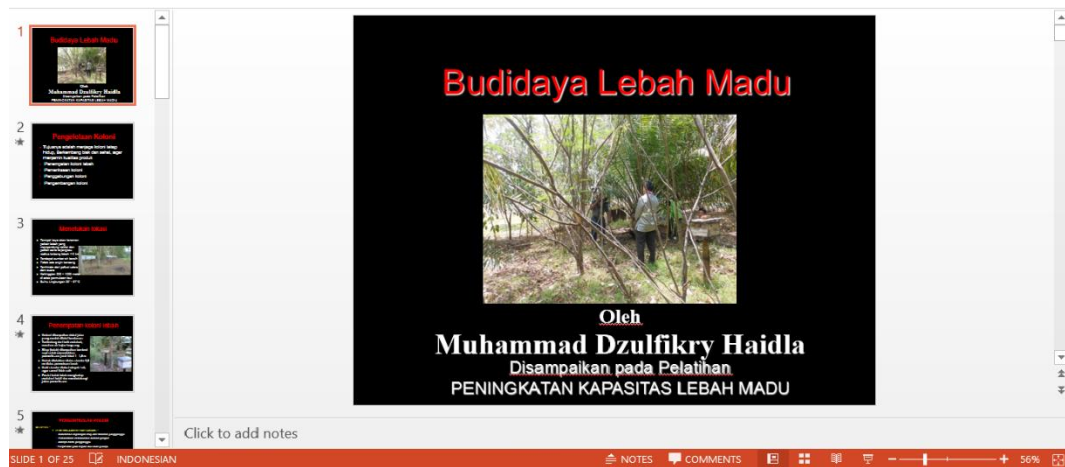
Berdasarkan data KPH Kusan, materi selanjutnya yang diberikan kepada masyarakat adalah analisa usaha dan pemasaran hasil panen budidaya lebah madu kelulut. Tujuan pemberian materi ini adalah sebagai bahan pertimbangan masyarakat untuk ikut serta dalam program budidaya lebah madu kelulut. Di dalam *powerpoint* tersebut antara lain berisi tentang asumsi luas lahan, jumlah koloni, dan rata – rata hasil panen yang nantinya akan berpengaruh pada biaya investasi, biaya produksi dan pendapatan selama lima tahun.



Gambar 4.7 Powerpoint Biologi Lebah Kelulut

Sumber: Dokumen KPH Kusan

Materi biologi lebah kelulut disampaikan pada hari kedua sebagai bahan pengenalan jenis dan perbedaan masing – masing lebah. Di dalam *powerpoint* tersebut berisi materi tentang jenis – jenis lebah, perilaku lebah, dan pengenalan tentang lebah madu kelulut atau lebah trigona. Materi ini disajikan secara singkat karena hanya sebagai bahan agar masyarakat memahami perbedaan macam – macam biologi lebah.



Gambar 4.8 Powerpoint Budidaya Lebah Madu

Sumber: Dokumen KPH Kusan

Setelah penyampaian materi biologi lebah kelulut, materi selanjutnya yang disampaikan yaitu budidaya lebah madu. Isi *slide* pada *powerpoint* materi ini adalah salah satu yang paling banyak daripada *powerpoint* lainnya karena berisi penjelasan lengkap mengenai budidaya lebah madu. Materi yang disajikan antara lain yaitu cara pengelolaan koloni, pengembangan koloni, kendala budidaya, cara mengatasi kendala dan pengaturan temperatur sarang lebah. Penyampaian materi ini sebagai pengenalan awal kepada masyarakat tentang cara budidaya lebah madu.



Gambar 4.9 Powerpoint Beternak Lebah Kelulut

Sumber: Dokumen KPH Kusan

Materi selanjutnya yang disampaikan adalah tentang cara beternak lebah kelulut. Pemberian materi ini sebagai kelanjutan dari materi sebelumnya yaitu budidaya lebah madu. Materi ini terdiri dari 22 *slide* dan berisi penjelasan secara rinci tentang cara beternak lebah madu kelulut. Powerpoint tersebut berisi tentang keunggulan lebah madu kelulut, persiapan pakan, persiapan kandang, dan cara pemeliharaan lebah madu kelulut. Berdasarkan hasil wawancara, pemberian dua materi tersebut sebagai pembekalan kepada masyarakat sebelum pelaksanaan praktik di lapangan.



Gambar 4.10 Powerpoint Peralatan Budidaya

Sumber: Dokumen KPH Kusan

Setelah penyampaian materi tentang cara budidaya, materi selanjutnya yang disampaikan adalah materi peralatan budidaya. Penyampaian materi ini bertujuan agar anggota kelompok tani hutan selain mengerti tentang cara budidaya yang benar juga mengetahui peralatan apa saja yang dibutuhkan untuk menunjang keberhasilan budidaya lebah madu kelulut. Di dalam *powerpoint* tersebut hanya menyajikan gambar tanpa keterangan karena nantinya akan dijelaskan langsung oleh penyuluh lapangan. Gambar yang disajikan antara lain adalah perlengkapan untuk pembuatan stupa, perlengkapan pemeliharaan, dan perlengkapan kemasan hasil panen madu.



Gambar 4.11 Powerpoint Panen dan Pasca Panen

Sumber: Dokumen KPH Kusan

Materi terakhir yang disampaikan sebelum pelaksanaan praktik di lapangan adalah materi panen dan pasca panen lebah madu kelulut. Materi yang disampaikan antara lain adalah ketentuan panen, cara panen, dan hasil olahan madu lebah kelulut. Berdasarkan hasil wawancara, *powerpoint* ini hanya berisi penjelasan singkat tentang materi – materi tersebut namun akan dijelaskan secara rinci saat praktik di lapangan.

Berdasarkan temuan dokumen, pada saat pelatihan para Kelompok Tani Hutan (KTH) diberikan fasilitas berupa ATK sederhana, baju dan uang saku selama masa pelatihan sebesar Rp 95.000/orang dan transport peserta sebesar Rp 100.000/orang untuk 3 hari. Mushawir menjelaskan bahwa pada program ini KTH hanya bermodal tenaga karena seluruh fasilitas disediakan oleh KPH. Hal ini dikarenakan belum adanya pengalaman dari KTH tentang budidaya lebah madu kelulut.

“Karena mereka belum ada pengalaman maka dari itu kita fasilitasi *full* dari awal sampai pemasaran”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Mushawir menambahkan, masyarakat yang sudah memutuskan untuk mengadopsi program nantinya akan terikat perjanjian yang diperkuat dengan Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang di dalamnya tercantum isi kesepakatan dan melibatkan kedua belah pihak yaitu antara KTH dengan KPH dan KTH dengan pemilik izin usaha.

“Untuk penguatan keputusan masyarakat, nanti setelah ada kesepakatan yang dituangkan dalam NKK (Nota Kesepakatan Kerjasama) antar kedua belah pihak. Antara KTH dengan KPH, antara KTH dengan pemilik izin usaha. Di dalamnya jelas tercantum isi kesepakatan, ditandatangani semua pihak berwenang.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan uraian di atas adalah sosialisasi untuk penguatan keputusan masyarakat dilaksanakan melalui FGD, dengan tujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif. Namun, berdasarkan hasil observasi peneliti, kegiatan FGD yang disebutkan oleh KPH sebenarnya lebih mengarah kepada komunikasi publik. Hal ini dikarenakan cara penyampaian

pesan oleh penyuluh pada saat sosialisasi berlangsung secara satu orang kepada orang banyak.

Pihak – pihak terlibat dalam pelaksanaannya antara lain perangkat desa, tokoh masyarakat, Pemerintah Provinsi, dan narasumber yang ahli dalam bidang lebah. Sedangkan untuk bimbingan teknis, KPH dibantu oleh Dinas Kehutanan dan praktisi dari Himpunan Petani Lebah Madu Tanah Laut (HIPMATALA). Desain pesan yang ditonjolkan dalam sosialisasi ini adalah tentang kualitas lebah dan tujuan program yaitu untuk perkembangan perekonomian masyarakat. Guna menunjang keberhasilan pemahaman masyarakat, penyuluh di lapangan menyajikan beberapa *powerpoint* yang disajikan secara terpisah agar menghasilkan pemahaman yang maksimal. Para KTH juga difasilitasi penuh oleh KPH dalam bentuk uang dan barang. Diakhir sosialisasi keputusan masyarakat nantinya akan diperkuat oleh Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK) yang di dalamnya tercantum isi kesepakatan dan melibatkan kedua belah pihak yaitu antara KTH dengan KPH dan KTH dengan pemilik izin usaha.

Tabel 4.2 Temuan Kunci Persepsi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kusan tentang Program Budidaya Lebah Madu Kelulut

No.	Informan	Temuan Kunci	
		Tatap Muka	FGD
1.	Syafriani	<ul style="list-style-type: none"> • Dari rumah ke rumah • Memaparkan tentang keberadaan 	<ul style="list-style-type: none"> • FGD terdiri dari tiga tingkatan: pengenalan, pemantapan

		lebah madu kelulut yang banyak tersedia tinggal bagaimana mengembangkan	kelompok, berbicara pasar dan kemitraan <ul style="list-style-type: none"> • Menyajikan <i>powerpoint</i> yang disampaikan secara terpisah • Membutuhkan bantuan dari luar kantor untuk bantuan teknis • Menonjolkan kualitas lebah yang nantinya akan berpengaruh pada harga
2.	Rishawan	<ul style="list-style-type: none"> • Memaparkan latar belakang program 	<ul style="list-style-type: none"> • Menonjolkan tujuan budidaya yaitu untuk menambahkan perekonomian masyarakat
3.	Mushawir		<ul style="list-style-type: none"> • Menyampaikan pesan positif tentang program kehutanan • FGD dalam bentuk diskusi kelompok yang sudah terarah • Mengundang perangkat desa, tokoh masyarakat, pemerintah provinsi, dan narasumber ahli dalam bidang lebah • Seluruh fasilitas disediakan KPH • Masyarakat akan terikat perjanjian dalam Nota Kesepakatan Kerjasama (NKK)

4.2.3 Hambatan terhadap Pengkomunikasian Program

Sedangkan untuk hambatan, Mushawir menyampaikan bahwa hambatan terletak di wawasan masyarakat yang menganggap program ini adalah salah satu trik pemerintah dan perusahaan yang ingin mengambil alih wilayah sekitar hutan yang notabennya adalah tempat masyarakat bekerja.

“Ketika kita sosialisasikan sebuah program untuk pemberdayaan masyarakat di bidang pengelolaan lahan hutan, sering masyarakat menganggap kalo program itu adalah trik pemerintah dan perusahaan pemegang izin untuk mencaplok wilayah mereka, tempat mereka bercocoktanam dan mencari penghidupan selama ini.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Upaya yang dilakukan oleh KPH untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melakukan pendekatan melalui penyuluhan terpadu dengan menampilkan berbagai peraturan pemerintah dan beberapa kali mengadakan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa tujuan dari pelaksanaan program ini semata – mata untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat.

“Cara atasi hambatan adalah dengan melakukan pendekatan melalui penyuluhan terpadu, dengan menampilkan berbagai peraturan pemerintah, dll. Jadi kita perlu beberapa kali untuk kegiatan sosialisasi untuk meyakinkan masyarakat bahwa semua kegiatan program dari pemerintah semata – mata hanyalah untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat serta kelestarian hutan.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Mushawir menyebutkan peraturan pemerintah yang dipaparkan untuk mendukung dalam meyakinkan masyarakat salah satunya peraturan dari kementerian kehutanan mengenai kewajiban melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan.

“Misalnya peraturan dari kementerian kehutanan mengenai kewajiban IUPHHK-HTTI (Izin Usaha Pengelolaan Hutan – Hutan Tanaman Industri) untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat sekitar hutan dimana terdapat hak izin pengelolaan perusahaan. Sehingga diharapkan dengan adanya suatu perusahaan di lokasi hutan, maka warga masyarakat perekonomiannya dan tentunya hutan juga menjadi lebih lestari.”

(Wawancara dengan Mushawir, 24 Juli 2018)

Syafriani menyampaikan hambatan lain yang terletak pada pertanyaan masyarakat tentang pasar. Sedangkan, Rishawan menyampaikan hambatan lebih terletak pada saat pelaksanaan mulai dari lokasi yang jauh, dan kendala cuaca. Persamaan persepsi tentang hambatan antara Syafriani dengan Rishawan terletak pada pertanyaan bagaimana menghasilkan pakan yang baik untuk lebah madu kelulut agar madu yang dihasilkan berkualitas. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu melalui sosialisasi.

“Mereka kadang – kadang banyak berbicara pasar. Mereka biasanya bertanya ini kalau sudah panen madunya siapa yang beli, kemana ngejual. Sedangkan masyarakat sana sudah disediakan madu hutan. Itu yang paling penting. lalu yang kedua pakan, diberi bunga hutan belum tentu bisa jadi madu bermutu madunya bisa jadi sangat pahit, ternyata setelah diselidiki dia (lebah) makan mahoni. Kalau dari kita diberi bibit bunga untuk ditanam.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

“Kalo dari pelaksanaannya itu kendalanya mungkin dari cara membawa stup karna kan lokasinya jauh jadi ada resiko kerusakan stup. Kendala cuaca juga termasuk. Dari pakan juga mempengaruhi keberhasilan lebah madu sendiri.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa hambatan pada pelaksanaan program ini dibagi menjadi lima bagian antara lain yaitu wawasan masyarakat yang menganggap bahwa program ini hanya akal – akalan pemangku kepentingan, pertanyaan masyarakat tentang pasar, lokasi yang jauh, kondisi cuaca, dan bagaimana menghasilkan pakan yang baik untuk lebah kelulut. Secara garis

besar, untuk mengatasi hambatan tersebut upaya yang dilakukan oleh KPH adalah melalui sosialisasi.

Tabel 4.3 Temuan Kunci Hambatan terhadap Pengkomunikasian Program

No.	Informan	Temuan Kunci	
		Hambatan	Upaya yang dilakukan
1.	Syafriani	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan soal pasar • Bagaimana menghasilkan pakan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui sosialisasi dalam bentuk FGD
2.	Rishawan	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi yang jauh • Kendala cuaca • Bagaimana menghasilkan pakan yang baik 	<ul style="list-style-type: none"> • Melalui sosialisasi dalam bentuk FGD
3.	Mushawir	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi masyarakat yang menganggap bahwa program ini hanya trik dari pemerintah dan perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan penyuluhan terpadu dengan menampilkan berbagai peraturan pemerintah, salah satunya mengenai kewajiban KPH untuk melakukan kemitraan dengan masyarakat hutan.

4.2.4 Persepsi Masyarakat terhadap Program Budidaya Lebah Madu

Kelulut

Berdasarkan kategorisasi data dari hasil wawancara, persepsi masyarakat terhadap program budidaya lebah madu kelulut dapat dilihat dari pengetahuan masyarakat tentang program, pentingnya program dan keraguan masyarakat akan keberhasilan program. Ayu sebagai salah satu anggota KTH menjelaskan

mekanisme program lebah madu kelulut ini dimulai dari pembentukan KTH yang terdiri minimal 15 orang yang kemudian diberi penjelasan bagaimana tata cara budidaya lebah madu kelulut.

“Sepengetahuan saya program ini melibatkan masyarakat sekitar hutan seperti saya ini untuk diperdayakan, dengan salah satunya membentuk KTH atau Kelompok Tani Hutan yang minimal orangnya 15. Dan kemudian diberi tau seperti ini tata cara budidaya lebah madu kelulut.”

(Wawancara dengan Ayu, 25 Juli 2018)

Sejalan dengan yang dijelaskan oleh Mushawir pada hambatan masyarakat, Ayu juga memaparkan bahwa pada awalnya kelompok tani hutan mengira bahwa program budidaya lebah madu ini akan diambil alih pemerintah setelah panen. Namun setelah disosialisasikan tentang tujuan program yang sebenarnya akhirnya masyarakat menyambut baik program budidaya lebah madu ini.

“Awalnya kan masyarakat mengira nanti pas mereka budidaya, sudah berhasil, bakalan diambil pemerintah, jadi disosialisasikan bahwa tidak seperti itu, mereka cuma bayar PNBP berapa persen lah, pokoknya ringan sekali, bayar PNBP itu sebagai timbal balik dari hibah yang diberikan. Nah jadi mereka semakin *exited* menyambut program budidaya lebah madu.”

(Wawancara dengan Ayu, 16 November 2018)

Ayu dan Karmila sebagai anggota KTH Al – Gafar menyebutkan bahwa program lebah madu kelulut ini merupakan solusi terbaik dari pemerintah yang sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian dan penting untuk menambah wawasan masyarakat sekitar hutan di Desa Batulicin.

“Iya penting. Ini sebagai menambah wawasan kami menambah ilmu yang pastinya menambah pemasukan.”

(Wawancara dengan Karmila, 24 Juli 2018)

“Sangat penting dan sangat membantu. Karena masyarakat sekitar hutan hidupnya di hutan bergantung dengan hutan. Dan sekarang pemerintah memberikan solusi terbaik ke kami untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian kami dengan membantu memfasilitasi mulai dari pelatihan, diberikannya stup lebah gratis.”

(Wawancara dengan Ayu, 25 Juli 2018)

Terlihat bahwa pemahaman dari kedua informan tersebut cenderung sama.

Namun, meskipun masyarakat menyambut baik adanya program lebah madu kelulut tersebut, ditemukan bahwa adanya keraguan masyarakat tentang keberhasilan program. Berbeda dengan Rishawan, Syafriani menyebutkan bahwa masyarakat biasanya lebih cenderung mempertanyakan soal pasar saat madu sudah panen.

“Tapi tetap masyarakatnya pasti ada yang mengelak mempertanyakan ini bagus tidak pak, berhasil tidak pak.”

(Wawancara dengan Rishawan, 25 Juli 2018)

“Mereka kadang – kadang berbicara pasar. Mereka biasanya bertanya ini kalo sudah panen madunya siapa yang beli, kemana ngejual.”

(Wawancara dengan Syafriani, 25 Juli 2018)

Meskipun demikian, keputusan masyarakat untuk mengikuti program lebah madu kelulut ini didasari tujuan yang jelas dari program yaitu untuk mensejahterakan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, fasilitas yang diberikan oleh KPH juga menjadi salah satu alasan mereka. Dengan kata lain KTH hanya bermodal tenaga pada awalnya meskipun nantinya KTH dikenakan PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) beberapa persen.

“Alasan saya jadi tertarik karena pertama dasar program ini tujuannya mensejahterakan masyarakat dan meningkatkan ekonomi kami masyarakat sekitar hutan ditambah kami tidak harus membeli alat atau sebagainya semuanya kan sudah disediakan. Hanya saja kami dikenakan PNBP beberapa persen, tapi itu tidak memberatkan. Jadi menurut saya tidak ada alasannya saya menolak ikut serta menjadi bagian dari KTH ini.”

(Wawancara dengan Ayu, 25 Juli 2018)

Selain karena fasilitas yang diberikan, Ayu menjelaskan sikap masyarakat terhadap program lebah madu kelulut terbilang aktif dikarenakan budidaya lebah madu kelulut tidak sesulit lebah lain.

“Mereka aktif membudidaya. Budidaya lebah madu kelulut ini tidak seribet lebah wanyi yang (warna) hitam, besar menyengat itu, kelulut ini kecil saja, dan tidak menyengat, jadi lebih mudah untuk mereka membudidayakan.”

(Wawancara dengan Ayu, 16 November 2018)

Berdasarkan hasil wawancara, Karmila menyebutkan bahwa melalui penyuluh lah program diperkenalkan. Dengan demikian, terlihat yang berperan penting dalam pengkomunikasian program lebah madu kelulut adalah penyuluh lapangan. Hal ini dikarenakan tugas penyuluh yang terjun langsung ke lapangan untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pernyataan Ayu yang menyebutkan bahwa peran aktif penyuluh mendampingi, memberi masukan dan arahan sampai pada praktik di lapangan.

“Dari penyuluh ke kelompok tani”

(Wawancara dengan Karmila, 24 Juli 2018)

“Dari awal perencanaan bakalan ada hibah bantuan budidaya lebah madu, penyuluh itu aktif ke desa yang jadi target untuk memberi tahu ke masyarakat melalui kepala desa, ketua RT, tokoh masyarakat. Tahap adanya sosialisasi bersama seluruh anggota KTH, penyuluh itu mendampingi, memberi masukan dan arahan. Sampai tahap membudidaya dan pemanenan penyuluh masih mendampingi, tidak di lepas”

(Wawancara dengan Ayu, 16 November 2018)

Karmila menambahkan, pesan yang disampaikan oleh penyuluh mudah diterima. Dalam penyampaian penyuluh menggunakan saluran media tatap muka dalam sosialisasi seperti yang dijelaskan Ayu. Hal ini dikarenakan masyarakat desa yang lebih menyukai pembicaraan non-formal dibandingkan formal.

“Gampang saja diterima kalau cara mereka menyampaikan, dilihat aja juga bisa.”

(Wawancara dengan Karmila, 24 Juli 2018)

“Cuman datang ke lokasi, ngobrol, seperti itu saja. Soalnya yang didampingi ini masyarakat desa, kalo bicara terlalu formal mereka tidak suka, mereka sukanya seperti semacam “jagongan” duduk santai, tapi dari pembicaraan tu ada intinya.”

(Wawancara dengan Ayu, 16 November 2018)

Dalam wawancara Ayu menjelaskan bahwa program ini menjadi salah satu inovasi bagi masyarakat karena hanya sebagian masyarakat saja yang mengenai tentang lebah madu kelulut. Pengetahuan masyarakat yang belum banyak tentang cara budidaya lebah madu kelulut juga menjadi salah satu alasan.

Mereka itu tau, cuman ilmu yang mereka punya itu seadanya dan cuman orang tertentu yang tau.

(Wawancara dengan Ayu, 16 November 2018)

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap program lebah madu kelulut terbilang positif berdasarkan paparan dari kedua informan. Dimulai dari pembentukan KTH yang terdiri dari minimal 15 orang, kemudian diberikan sosialisasi dan penjelasan tentang bagaimana tata cara budidaya lebah madu yang benar. Meskipun pada awalnya masyarakat mengira bahwa program ini hanya akan menguntungkan pemerintah, namun setelah diberikan penjelasan pada akhirnya masyarakat menyambut baik program ini. Menurut mereka program ini merupakan solusi terbaik dari pemerintah karena meningkatkan perekonomian dan menambah wawasan masyarakat sekitar hutan. Selain itu, fasilitas penuh yang diberikan KPH dan cara budidaya yang tidak sesulit lebah lain menjadi alasan lain bagi masyarakat. Peran aktif penyuluh dalam mendampingi, memberi masukan dan arahan sampai pada praktik di lapangan

membuat masyarakat semakin mudah dalam memahami dan mengadopsi program. Berdasarkan pengetahuan masyarakat yang belum banyak tentang lebah madu kelulut, maka program ini menjadi salah satu inovasi bagi masyarakat Desa Batulicin.

Tabel 4.4 Temuan Kunci Persepsi Masyarakat terhadap Program Budidaya Lebah Madu Kelulut

No	Informan	Temuan Kunci		
		Pengetahuan masyarakat	Tujuan program	Keraguan masyarakat
1.	Ayu	<ul style="list-style-type: none"> • Melibatkan masyarakat sekitar hutan untuk diperdayakan dengan membentuk KTH minimal 15 orang • Budidaya lebah madu kelulut tidak sesulit lebah wanyi • Penyuluh aktif mendampingi, memberi masukan, dan arahan sampai pada praktik di lapangan • Saluran yang digunakan adalah tatap muka 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat membantu untuk meningkatkan perekonomian 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengira bahwa setelah panen hasilnya akan diambil alih pemerintah

2.	Karmila	<ul style="list-style-type: none"> • Program diperkenalkan oleh penyuluh ke kelompok tani • Penyampaian dari penyuluh mudah diterima 	<ul style="list-style-type: none"> • Menambah wawasan, ilmu, dan pemasukan 	
----	---------	--	---	--

4.3 Upaya Pengkomunikasian Program Berkaitan dengan Hambatan yang Muncul

Berdasarkan data dalam kategori upaya pengkomunikasian program dengan data dalam kategori hambatan yang muncul terdapat kecenderungan bahwa penggunaan media komunikasi yang sifatnya tatap muka dan FGD memunculkan hambatan tentang keraguan masyarakat tentang keberhasilan program. Keraguan masyarakat cenderung dalam bentuk pertanyaan tentang pasar, menghasilkan pakan yang baik, cara membawa stupa ke lokasi budidaya, dan kendala cuaca. Selain itu, hambatan juga muncul pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap program lebah madu kelulut. Masyarakat menganggap bahwa program yang diberikan kepada mereka adalah trik dari pemerintah dan perusahaan untuk mengambil alih lahan sekitar hutan dengan kedok membudidayakan masyarakat.

Upaya yang dilakukan oleh KPH Kusan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah dengan mengadakan sosialisasi terpadu yang terus berulang. Berdasarkan hasil wawancara, informan menyampaikan bahwa semakin banyak FGD yang dilaksanakan menghasilkan semakin tingginya pemahaman tentang program yang berpengaruh pada tingkat kepercayaan masyarakat.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penyajian data ditemukan bahwa program budidaya lebah madu kelulut yang diterapkan kepada masyarakat sekitar hutan Desa Batulicin dalam bentuk sosialisasi dan bantuan teknis dengan tujuan adanya perubahan yang terjadi pada individu maupun kelompok tani hutan dapat dikategorikan sebagai inovasi karena menjadi salah satu program baru yang diterima oleh masyarakat. Berdasarkan hasil temuan, inovasi didasarkan pada sumber pendapatan masyarakat yang beragam, antara lain pendulang emas, petani, dan peternak. Meskipun sebagian besar mereka adalah petani lebah madu alam, namun terdapat perbedaan cara budidaya antara lebah madu alam dan lebah madu kelulut. Sehingga, selain berdasarkan pendapatan masyarakat program ini juga dapat dikatakan sebagai inovasi berdasarkan pada pengalaman masyarakat. Hal ini dikarenakan program ini memperkenalkan teknik budidaya lebah madu dengan cara yang berbeda dari biasanya.

Selain itu, belum adanya peraturan yang mengikat antara masyarakat dengan pemerintah pada program sebelumnya mengakibatkan banyak program yang tidak berjalan semestinya juga menjadi salah satu alasan program ini dapat dikatakan sebagai inovasi. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rogers (1983) bahwa inovasi adalah gagasan, tindakan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Alasan lain mengapa lebah madu kelulut hadir sebagai inovasi dari KPH Kusan bagi masyarakat adalah karena diselenggarakannya program ini merupakan hibah kepada kelompok tani hutan sebagai bentuk implementasi program Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat.

Di dalam penelitian ini, terdapat lima karakteristik inovasi yang dimiliki oleh program budidaya lebah madu kelulut sesuai dengan yang disebutkan Rogers (1983), antara lain keunggulan relatif, kompatibilitas, kerumitan, kemampuan diuji cobakan, dan kemampuan diamati. Karakteristik tersebut digunakan untuk melihat kemungkinan suatu inovasi diterima atau ditolak oleh penerimanya yang dalam hal ini adalah masyarakat sekitar hutan Desa Batulicin.

Berdasarkan hasil pengamatan, ada beberapa alasan mengapa program budidaya lebah madu kelulut dikatakan sebagai inovasi. Salah satunya adalah karena program ini mengandung nilai ekonomi yang tinggi sebagaimana data dalam penelitian ini yang menunjukkan bahwa tujuan dari program budidaya lebah madu kelulut adalah untuk meningkatkan produktivitas petani sebagai nilai ekonomis dari hasil hutan bukan kayu. Maka hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rogers (1983) sebagai keunggulan relatif.

Selanjutnya, berdasarkan hasil pengamatan peneliti, tidak ditemukan adanya permasalahan pada pelaksanaan program budidaya lebah madu kelulut dengan nilai dan norma masyarakat setempat. Hal ini dikarenakan karakteristik masyarakat Desa Batulicin yang terbuka dan mudah menerima suatu inovasi. Anggota kelompok tani hutan menyatakan bahwa program ini sangat membantu masyarakat hutan yang hidupnya bergantung dari hutan, maka dari itu program budidaya lebah madu kelulut termasuk ke dalam karakteristik kompatibilitas sebagaimana yang dikemukakan Rogers (1983).

Complexity atau kesulitan utama pada proses pengadopsian terletak pada kurangnya wawasan masyarakat tentang lebah madu kelulut. Selain itu, persepsi masyarakat yang menganggap bahwa program ini hanyalah trik pemerintah untuk mengambil alih lahan hutan berkedok pemberdayaan masyarakat juga menjadi salah satu hambatan masyarakat yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap program. Kesulitan atau hambatan tersebut dapat diatasi dengan pendekatan melalui penyuluhan terpadu dengan menampilkan berbagai peraturan pemerintah dan menjelaskan bahwa tujuan program ini semata – mata hanyalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjaga kelestarian hutan. Dengan demikian, setelah diadakan sosialisasi akhirnya masyarakat mengerti dan bersedia mengadopsi program ini. Hal ini sejalan dengan yang disebutkan Rogers (1983) bahwa kerumitan suatu inovasi akan mempengaruhi keputusan masyarakat dalam mengadopsi inovasi.

Berkaitan dengan proses komunikasi pembangunan, salah satu pesan yang disampaikan oleh penyuluh saat sosialisasi adalah menyampaikan bahwa program ini sepenuhnya akan difasilitasi oleh KPH mulai dari pelatihan sampai dengan pemberian stupa lebah gratis, dengan kata lain masyarakat hanya bermodal tenaga. Selain itu berdasarkan hasil pengamatan, pemaparan peraturan yang jelas tentang kewajiban KPH dalam melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar hutan juga menjadi salah satu alasan bahwa program ini layak untuk diadopsi. Hal ini sejalan dengan penjelasan tentang kemampuan diuji cobakannya suatu inovasi sebagaimana dijelaskan oleh Rogers (1983) bahwa suatu inovasi sebaiknya harus mampu menunjukkan keunggulannya.

Pesan lain yang disampaikan adalah bahwa program lebah madu kelulut sebelumnya sudah pernah berhasil di daerah lain. Berdasarkan hasil pengamatan, pesan tersebut ternyata hadir sebagai salah satu bahan pertimbangan yang mempengaruhi keputusan masyarakat Desa Batulicin dalam menerima program. Hal ini juga sejalan dengan pendapat Rogers (1983) yang menyatakan bahwa kecepatan masyarakat dalam mengadopsi suatu inovasi dipengaruhi oleh derajat hasil suatu inovasi dapat dilihat oleh orang lain.

Mengingat bahwa program budidaya lebah madu kelulut merupakan sebuah inovasi yang diberikan kepada masyarakat, maka dengan karakteristik masyarakat yang terbuka terhadap sesuatu yang baru, KPH Kusan melaksanakan dua tahap sosialisasi sebelum pelaksanaan praktik di lapangan. Tahapan – tahapan yang dilakukan KPH Kusan dalam upaya mensosialisasikan program tersebut dapat dilihat dalam perspektif komunikasi pembangunan. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, ditemukan bahwa program budidaya lebah madu kelulut termasuk dalam aktivitas komunikasi pembangunan karena dirancang untuk mendorong partisipasi aktif para sasaran pembangunan yang dalam hal ini adalah masyarakat Desa Batulicin. Suhartini dkk (2005) menyebutkan partisipasi aktif tersebut meliputi beberapa aspek antara lain identifikasi kebutuhan dan potensi yang dimiliki, penyusunan rencana, pelaksanaan program, *monitoring* dan evaluasi, kaderisasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Berdasarkan hasil pengamatan, tahapan – tahapan yang dilakukan oleh KPH Kusan dalam pelaksanaan program budidaya lebah madu kelulut sejalan dengan partisipasi aktif yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005). Sebelum pelaksanaan

sosialisasi KPH Kusan melakukan survei ke Desa Batulicin dengan tujuan untuk mencari tahu apakah daerah yang menjadi sasaran berpotensi untuk mendukung program budidaya lebah madu kelulut khususnya pada penanaman bunga untuk pakan lebah. Hal ini sejalan dengan aspek identifikasi potensi pada partisipasi aktif yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005).

Dalam proses penyebarluasan inovasi, informan menyebutkan bahwa pada pelaksanaannya KPH Kusan memiliki beberapa tahapan yang meliputi identifikasi daerah yang potensial, memperkenalkan lebah madu kelulut, berusaha menarik minat masyarakat, melaksanakan sosialisasi mulai dari pengenalan sampai pemasaran, menginformasikan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagai penyedia alat, dan sampai pada melakukan pendampingan dalam proses produksi serta memfasilitasi botol sebagai tempat madu dan izin ke berbagai dinas terkait. Tahapan – tahapan tersebut termasuk ke dalam aspek penyusunan rencana pada partisipasi aktif yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005).

Setelah pelaksanaan teknis di lapangan, KPH Kusan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan program budidaya lebah madu kelulut. Informan menyampaikan pengawasan dilakukan oleh dua pihak yaitu KPH Kusan dan Pemerintah Provinsi. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KPH Kusan berjalan setiap hari selama masa budidaya, sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi hanya pada akhir tahun. Tujuan dari pengawasan tersebut adalah untuk memonitor, meluruskan, dan mendampingi kegiatan yang sedang berjalan. Hasil pengawasan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan evaluasi yang nantinya akan dituliskan KPH Kusan dalam laporan tahunan KPH Kusan sebagai

acuan keberhasilan suatu program. Hal ini sejalan dengan aspek *monitoring* dan evaluasi yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005) dalam partisipasi aktif pelaku pembangunan.

Sebagai pelaku pembangunan, KPH Kusan membutuhkan peran masyarakat sebagai calon adopter sebuah program. Untuk itu KPH Kusan melaksanakan kaderisasi dengan tujuan agar masyarakat ikut serta dalam pengimplementasian program hasil hutan bukan kayu yang dalam penelitian ini adalah program budidaya lebah madu kelulut. Dalam pelaksanaan kaderisasi, KPH membentuk kelompok tani hutan dengan minimal 15 orang anggota yang selanjutnya diberi pendampingan mulai dari sosialisasi sampai praktik di lapangan. Hal ini sejalan dengan aspek kaderisasi yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005) di dalam partisipasi aktif.

Setelah melaksanakan beberapa aspek sebelumnya, aspek terakhir yang dijalankan oleh KPH Kusan adalah memanfaatkan hasil yang dalam hal ini adalah hasil panen dari budidaya lebah madu kelulut. Hasil panen tersebut nantinya akan dijual dan hasil penjualannya akan diberikan kepada kelompok tani hutan. Sebagai bentuk partisipasi KTH, mereka nantinya akan dikenakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya beberapa persen dengan tujuan agar tidak memberatkan KTH. Hal ini sejalan dengan aspek pemanfaatan hasil pembangunan pada partisipasi aktif yang disebutkan oleh Suhartini dkk.

Akan tetapi jika dilihat dari segi masyarakat, partisipasi aktif yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005) tersebut tidak sesuai dengan bentuk partisipasi yang diterapkan oleh masyarakat. Padahal konsep utama komunikasi

pembangunan yang disebutkan oleh Suhartini dkk (2005) adalah untuk mendorong partisipasi aktif para sasaran pembangunan. Maka dari itu, berdasarkan jenis partisipasi menurut Hamijoyo (2005) dalam Sulastika (2018), bentuk partisipasi masyarakat Desa Batulicin bersifat semu atau *pseudo participatory*. Hal ini dikarenakan bentuk partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat tidak berasal dari inisiatif mereka sendiri, melainkan berdasarkan arahan dari KPH Kusan. Dengan demikian, seluruh keputusan untuk perencanaan dibuat oleh KPH Kusan, sedangkan masyarakat Desa Batulicin pada program ini hanya sebagai objek pembangunan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian partisipasi semu menurut Hamijoyo (2005).

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa program budidaya lebah madu kelulut menggunakan satu dari empat strategi komunikasi pembangunan yang dikemukakan oleh AED (dalam Harun dan Ardiyanto, 2012) dalam mewujudkan kesuksesan komunikasi pembangunan. Strategi yang digunakan adalah strategi desain instruksional. Sejalan dengan penelitian ini, kegiatan pada strategi ini memiliki tiga tahapan yang saling berkaitan yaitu perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Berdasarkan hasil pengamatan, KPH Kusan memiliki beberapa tahapan perencanaan dalam pelaksanaan budidaya lebah madu kelulut. Tahapan tersebut meliputi identifikasi daerah sasaran, memperkenalkan lebah madu kelulut, berusaha menarik minat masyarakat, melaksanakan sosialisasi mulai dari pengenalan sampai pemasaran, menginformasikan ke Balai Pengelolaan Hutan Produksi (BPHP) sebagai penyedia alat, dan sampai pada melakukan pendampingan dalam proses

produksi serta memfasilitasi botol sebagai tempat madu dan izin ke berbagai dinas terkait.

Tahap selanjutnya yaitu implementasi, meliputi sosialisasi yang dilakukan oleh KPH Kusan dalam upaya pengkomunikasian program budidaya lebah madu kelulut. Upaya pengkomunikasian yang dilakukan oleh KPH Kusan untuk menyukseskan peran dan fungsi komunikasi tersebut berbentuk sosialisasi yang terdiri dari dua tahapan yaitu sosialisasi untuk memperkenalkan program dan sosialisasi untuk penguatan keputusan masyarakat. Pelaksanaan sosialisasi untuk memperkenalkan program dilaksanakan dalam bentuk tatap muka atau *door to door*. Pada pelaksanaannya, pesan yang disampaikan antara lain memaparkan latar belakang program dan keunggulan lebah madu kelulut dengan tujuan agar masyarakat mengerti dan bersedia mengadopsi program. Sedangkan, sosialisasi untuk penguatan keputusan masyarakat dilaksanakan dalam bentuk FGD. Berbeda dengan tahap yang pertama, saat FGD pesan yang disampaikan selain melalui verbal juga menyajikan *powerpoint* yang berisi tentang kebijakan pemerintah tentang HHBK, penguatan kelembagaan Kelompok Tani Hutan (KTH), peran KPH dalam pengembangan HHBK, peran KTH dalam perlindungan hutan, analisa usaha dan peralatan budidaya, pengenalan koloni dan biologi kelulut, budidaya kelulut dan pemanenan dan budidaya lebah madu. Berdasarkan hasil penyajian data tersebut, terlihat bahwa saluran komunikasi yang digunakan KPH Kusan dalam penyampaian pesan dalam mempersuasi masyarakat hanya melalui saluran interpersonal. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan Rogers (1983) bahwa saluran interpersonal lebih optimal digunakan pada tahap persuasi.

Tujuan dari pelaksanaan sosialisasi tersebut adalah untuk mengajak dan menyadarkan masyarakat bahwa program ini semata – mata hanya untuk meningkatkan taraf hidup dan perekonomian masyarakat serta kelestarian hutan. Tujuan program tersebut sejalan dengan konsep modernisasi yang disebutkan Kanto (2006), bahwa modernisasi berarti suatu proses mendifusikan suatu budaya atau inovasi kepada masyarakat dengan tujuan pembangunan masyarakat. Dengan demikian, untuk menyukseskan tujuan tersebut KPH Kusan menempatkan kelompok tani hutan sebagai objek pembangunan. Hal ini terlihat dari cara sosialisasi yang dilakukan oleh KPH Kusan sebagai komunikator program. Berdasarkan hasil pengamatan, peneliti melihat bahwa pada pelaksanaan dua tahap sosialisasi tersebut anggota kelompok tani hutan bersifat pasif. Hal ini dikarenakan kelompok tani hutan memposisikan diri hanya sebagai audiens. Dalam artian kelompok tani hutan terbuka dengan semua kebijakan yang dipaparkan oleh KPH Kusan. Meskipun ada beberapa keraguan dari masyarakat tentang tujuan dan keberhasilan program, namun setelah dilakukan sosialisasi masyarakat bersedia mengadopsi program.

Terakhir, tahap evaluasi dilakukan setelah pelaksanaan praktik di lapangan sebagai acuan berhasil atau tidaknya program tersebut. Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh KPH Kusan ini nantinya akan dicatat pada Laporan Tahunan KPH Kusan. Sebelum tahap evaluasi, KPH Kusan melaksanakan *monitoring* yang dilaksanakan setiap hari selama masa budidaya dan setiap akhir tahun oleh Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti melihat penggunaan paradigma modernisasi masih relevan digunakan pada penelitian ini karena cara budidaya lebah madu yang sebelumnya belum pernah diterapkan oleh masyarakat Desa Batulicin ini diterapkan secara *universal* dalam artian tidak hanya di KPH Kusan berdasarkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.35/Menhut-II/2007 tentang pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK). Melalui program ini KPH Kusan memiliki misi untuk meningkatkan produktivitas masyarakat yang sama sekali belum pernah menerapkan teknologi ini dengan latar belakang petani, peternak dan pendulang emas sebagai sasaran. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa karakteristik masyarakat terbelah pasif dan mudah menerima inovasi. Maka dari itu, KPH Kusan sebagai pemangku kepentingan dalam menjalankan program ini menggunakan model komunikasi *top-down* atau dari atas ke bawah dan bersifat satu arah sejalan dengan paradigma modernisasi yang disebutkan oleh Nasution (1996).

Seperti yang diungkapkan oleh Nasution (1996), bahwa komunikasi pembangunan meliputi peran dan fungsi komunikasi di antara semua pihak yang terlibat dalam usaha pembangunan; terutama antara masyarakat dengan pemerintah, sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian terhadap pembangunan. Dalam penelitian ini, peran dan fungsi komunikasi tersebut adalah agar masyarakat sekitar hutan Desa Batulicin tertarik untuk ikut serta dalam program budidaya lebah madu kelulut yang dilaksanakan oleh KPH Kusan. Sejalan dengan yang disebutkan Dilla (2007) bahwa pembangunan pada dasarnya melibatkan minimal tiga komponen yaitu komunikator program, pesan pembangunan, dan komunikan

pembangunan. Dengan demikian, program budidaya lebah madu kelulut mampu dikatakan sebagai program yang berorientasi pada pembangunan karena melibatkan tiga komponen utama tersebut antara lain: (1) komunikator program, yang dalam penelitian ini adalah KPH Kusan khususnya penyuluh lapangan dibantu oleh Dinas Kehutanan dan praktisi dari Himpunan Petani Lebah Madu Tanah Laut (HIPMATALA), (2) pesan pembangunan, yaitu pesan yang disampaikan dengan tujuan menarik minat masyarakat agar ikut serta dalam program budidaya lebah madu kelulut dan (3) komunikan pembangunan, yaitu masyarakat Desa Batulicin yang tergabung dalam anggota kelompok tani hutan Al – Gafar.

Dengan demikian, penelitian ini telah dapat menunjukkan bagaimana inovasi berupa program budidaya lebah madu kelulut disebarluaskan pada masyarakat Desa Batulicin sebagai target adopter. Dalam konteks studi berbasis difusi inovasi, penelitian ini tidak melihat bagaimana tahapan atau proses adopsi terhadap inovasi, melainkan melihat proses penyebarluasan inovasi tersebut. Berdasarkan paparan di atas, peneliti telah mampu menunjukkan bagaimana inovasi pada program budidaya lebah madu kelulut dikomunikasikan kepada masyarakat. Maka dalam kaitannya dengan studi – studi yang menggunakan difusi inovasi, penelitian ini telah mampu menunjukkan bagaimana difusi inovasi dapat dilihat dari strategi pengkomunikasiannya. Hal ini berbeda dengan beberapa studi terdahulu yang menunjukkan bagaimana difusi inovasi digunakan untuk melihat pengadopsian oleh masyarakat seperti penelitian yang dilakukan oleh Ahmad (2016). Penelitian tersebut bertujuan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Komunitas Kuya Tilubelas dalam menyadarkan warga RW 13 Tamansari Bandung

sebagai penghuni di sekitaran bantaran sungai Cikapundung. Hasil penelitian mengungkapkan model konseptual yang sedang disebarkan oleh komunitas kepada masyarakat RW 13 Tamansari yaitu berupa gagasan yang bernama gerakan Cikapundung bersih dan menunjukkan empat RT dapat menerima dan mengadaptasi gagasan yang disebarkan oleh komunitas, sementara tiga RT lainnya memilih untuk berhenti mengadopsi gerakan tersebut.

Selain itu, Warnaen dkk (2016) juga melakukan penelitian yang bertujuan untuk menguji proses adopsi inovasi pada petani tanaman pangan di Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adopsi inovasi pada petani di Kabupaten Takalar, khususnya di Kecamatan Polobangkeng Utara diawali dengan beberapa tahap, mulai dari tahap pengetahuan, persuasi, keputusan dan konfirmasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa difusi dari proses inovasi dan desain inovasi yang terjadi pada petani adalah satu arah yaitu dari peneliti atau pemangku kebijakan disebarkan oleh agen perubahan dan dipraktikkan oleh petani sehingga petani tidak dilibatkan dalam penciptaan sebuah inovasi.

Berbeda dengan dua penelitian di atas yang menggunakan difusi inovasi untuk melihat penerapan inovasi pada masyarakat, penelitian ini berfokus pada bagaimana upaya pengkomunikasian program budidaya lebah madu kelulut oleh KPH Kusan agar mampu menarik minat masyarakat. Dalam pelaksanaannya, KPH Kusan sebagai komunikator program hanya menggunakan satu saluran yaitu tatap muka. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan saluran tatap muka dalam bentuk sosialisasi bertujuan agar terciptanya komunikasi yang efektif dalam mencapai

tujuan sosialisasi. Hal ini berbeda dengan studi – studi terdahulu yang menggunakan dua saluran yaitu tatap muka dan media massa untuk menunjang keberhasilan sosialisasi. Alasan penggunaan satu saluran saja pada sosialisasi yang dilaksanakan oleh KPH Kusan dikarenakan lokasi desa yang terpencil dan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang media massa. Informan menyatakan media massa hanya digunakan untuk memperkenalkan hasil budidaya setelah masa panen kepada masyarakat luas untuk mempermudah pemasaran.





BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Program budidaya lebah madu kelulut merupakan hibah kepada masyarakat sekitar hutan sebagai bentuk pengimplementasian program hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari KPH Kusan. Program ini dapat dikatakan menjadi sebuah inovasi bagi masyarakat berdasarkan pada pengalaman masyarakat, sumber pendapatan masyarakat yang beragam, dan peraturan baru dari KPH Kusan.
2. Strategi komunikasi pembangunan yang digunakan KPH Kusan dalam menyebarluaskan inovasi adalah strategi desain intruksional. Hal ini dikarenakan kegiatan dalam pelaksanaan budidaya lebah madu kelulut sejalan dengan tahapan yang ada dalam strategi desain intruksional yaitu tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi.
3. Penelitian ini membuktikan penggunaan paradigma modernisasi masih relevan digunakan karena menjadikan masyarakat dengan latar belakang petani, peternak dan pendulang emas sebagai sasaran. Selain itu, karakteristik masyarakat yang belum pernah sama sekali menerapkan program budidaya lebah madu kelulut menjadi alasan penggunaan model komunikasi *top-down* atau dari atas ke bawah dan bersifat satu arah sejalan dengan paradigma modernisasi.

5.2 Limitasi Penelitian

1. Penelitian ini hanya mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumen, namun belum menggunakan observasi.
2. Penelitian ini hanya mengamati program budidaya lebah madu kelulut yang diterapkan di Desa Batulicin khususnya pada kelompok tani hutan Al-Gafar

5.3 Rekomendasi

Berdasarkan limitasi penelitian tersebut, maka peneliti merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji strategi komunikasi pembangunan yang diselenggarakan oleh KPH Kusan dalam lingkup yang lebih luas tidak hanya mengkaji di satu daerah dan satu kelompok tani hutan saja. Hal ini bertujuan agar terdapat keragaman informasi dari sisi masyarakat. Selain itu, peneliti juga merekomendasikan kepada peneliti selanjutnya untuk mengkaji bagaimana penerimaan inovasi dari sisi masyarakat. Hal ini dikarenakan inovasi yang diterapkan oleh masyarakat tentunya memiliki sudut pandang tersendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, R. (2016). *Difusi Inovasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Akan Kelestarian Lingkungan*. *Sosietas*. 6 (2). Diakses dari ejournal.upi.edu/index.php/sosietas/article/view/4244
- Aryadi, M. (2012). *HUTAN RAKYAT: Fenomenologi Adaptasi Budaya Masyarakat*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Black, J. A & Champion, D. J. (2009). *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Bungin, B. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Kencana. Tersedia dalam <https://books.google.co.id/books?id=rBVNDwAAQBAJ&pg=PA132&dq=sumber+data+penelitian&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj7Lrg24XbAhUCJpQKHUFxDR0Q6AEIMzAC#v=onepage&q=sumber%20data%20penelitian&f=false>
- Dilla, S. (2007). *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN: Pendekatan Terpadu*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Dinas Kehutanan. (2017). *Laporan Kinerja Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016*. Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Deutch Welle. (2017). *WWF: Kalimantan Bakal Kehilangan 75 Persen Hutan Pada 2020*. Diakses pada 2 April 2018, dari <http://www.dw.com/id/wwf-kalimantan-bakal-kehilangan-75-persen-hutan-pada-2020/a-39124270>
- Harinta, Y. W. (2011). *Adopsi Inovasi Pertanian Di Kalangan Petani Di Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo*. *Jurnal Agrin*. 15 (2): 1-11. Diakses dari jurnalagrin.net/index.php/agrin/article/view/192
- Harun, R & Ardianto, E. (2012). *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN PERUBAHAN SOSIAL: Perspektif Dominan, Kaji Ulang, dan Teori Kritis*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Halim, A., Suhartini, Rr., Arif, M.C., Sunarto, A. (2005). *MANAJEMEN PESANTREN*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren. Tersedia dalam https://books.google.co.id/books?id=NElcVVZ1dBYC&pg=PA144&dq=fungsi+komunikasi+pembangunan&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi6_mLwd3aAhWJQI8KHdbLCFsQ6AEIKDAA#v=onepage&q=fungsi%20komunikasi%20pembangunan&f=false
- Herdiansyah, H. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu – Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Herdiansyah, H. (2013). *WAWANCARA, OBSERVASI, DAN FOCUS GROUPS: Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Indriana, E. Y. (2014). *Strategi Komunikasi Pemasaran Sosial Program Bank Sampah (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang)*. Diakses dari eprints.umm.ac.id/25548/1/jiptummpg-gdl-eviyulastr-36559-1-pendahul-n.pdf
- Istiati, F. (2016). *Difusi Inovasi dalam Kegiatan Komunikasi Pembangunan* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016). Diakses dari digilib.uin-suka.ac.id/23975/1/12730038_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA.pdf

Kanto, S. (2006). *MODERNISASI DAN PERUBAHAN SOSIAL: Suatu Kajian Dari Perspektif Teori dan Empirik*. Malang: Universitas Brawijaya.

Kriyantono, R. (2006). *Teknis Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Kesatuan Pengelolaan Hutan. (n.d). *Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Usaha Pemanfaatan HHBK KPH Kusan (KPH Unit IV Tanah Bumbu Kalimantan Selatan)*. Diakses pada 1 April 2018, dari http://kph.menlhk.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=474%3Apeningkatan-kapasitas-masyarakat-dalam-usaha-pemanfaatan-hhb-kph-kusan-kph-unit-iv-tanah-bumbu-kalimantan-selatan&catid=1%3Aberita-kph&Itemid=165

Martono, N.(2016). *Sosiologi Perubahan Sosial: Perspektif Klasik, Modern, Posmodern, dan Poskolonial*. Jakarta: Rajawali Pers.

Miles, M. B., Huberman, A. M., Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. California: SAGE Publications Ltd.

Melida. (2015). *Strategi Komunikasi Pelaksana Badan Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera (Bkbks) Kota Samarinda Dalam Mensosialisasikan Program Pendewasaan Usia Perkawinan (Pup) Kepada Remaja*. eJournal Ilmu Komunikasi. 3 (1): 129-140. Diakses dari [ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/.../E%20-%20Jurnal%20\(02-18-15-07-01-56\).pdf](http://ejournal.ilkom.fisip-unmul.ac.id/.../E%20-%20Jurnal%20(02-18-15-07-01-56).pdf)

Moleong, L. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Melkote, S. R & Steeves, H. L. (2001). *Communication For Development In The Third World: Theory And Practice For Empowerment 2nd Edition*. India: Sage Publications. Tersedia dalam <https://books.google.co.id/books?id=PKAi6t2e5AEC&pg=PA19&lpg=PA19&dq=Communication+for+Development+in+the+Third+World:+Theory+and+Practice+for+Empowerment&source=bl&ots=3n5bJtyiTw&sig=VH2pk9n8OdEt51Di2tezcbel9Vg&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwin7vV1djaAhXKs48KHQEQCig4ChDoAQgnMAA#v=onepage&q=Communication%20for%20Development%20in%20the%20Third%20World%3A%20Theory%20and%20Practice%20for%20Empowerment&f=false>

Nasution, Z. (1996). *KOMUNIKASI PEMBANGUNAN: Pengenalan Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.

Ordika, B. D. (2012). *Difusi Inovasi Posyandu Peduli Tumbuh Aktif Tanggap Oleh Pt Nestle Indonesia-Dancow Batita Bekerjasama Dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Di Kota Malang Tahun 2012* (Tesis, Universitas Indonesia). Diakses dari lib.ui.ac.id/file?file=digital/20301505-T30613-Bagus%20Dwi%20Ordika.pdf

Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: Lkis. Tersedia dalam <https://books.google.co.id/books?id=UfM33NzcHJsC&pg=PA35&dq=metode+penelitian+kualitatif+komunikasi&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwj65Ij084DbAhUCYo8KHTThBbwQ6AEIKDAA#v=onepage&q=metode%20penelitian%20kualitatif%20komunikasi&f=false>

[PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR: P.19/Menhut-II/2009 TENTANG STRATEGI PENGEMBANGAN HASIL HUTAN BUKAN KAYU NASIONAL.](#)

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR: P.35/ Menhut-II/ 2007 TENTANG HASIL HUTAN BUKAN KAYU.

- Pratama, H. W. (2016). *DIFUSI INOVASI DAN ADOPSI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL* (Skripsi, Universitas Sebelas Maret). Diakses dari <https://eprints.uns.ac.id/25168/>
- Rakhmat, J. (2009). *METODE PENELITIAN KOMUNIKASI: Dilengkapi Contoh Analisis Statistik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rmol. (2011). *Kerusakan Hutan Kalimantan Rugikan Negara 241 Triliun*. Diakses pada 2 April 2018, dari <http://www.rmol.co/read/2011/07/24/34048/Kerusakan-Hutan-Kalimantan-Rugikan-Negara-241-Triliun->
- Rogers, E. M. (1983). *DIFFUSION OF INNOVATIONS: Third Edition*. New York: The Free Press.
- Romadhan, S. (2010). *Difusi Inovasi Teknologi Komunikasi Di Kalangan Pondok Pesantren Muhammadiyah*. Diakses dari www.lemnit.uhamka.ac.id/files/difusi-teknologi-internet.pdf
- Samsuardi. (n.d). *Kehutanan*. Diakses pada 1 april 2018, dari https://www.wwf.or.id/tentang_wwf/upaya_kami/forest_spesies/tentang_forest_spesies/kehutanan/
- Sucahya, M & Surahman, S. (2017). *DIFUSI INOVASI PROGRAM BANK SAMPAH (Model Difusi Inovasi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Bank Sampah Alam Lestari di Kota Serang Provinsi Banten)*. Jurnal Ilmu Komunikasi. 8 (1), 63-79. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/322095937_DIFUSI_INOVASI_PROGRAM_BANK_SAMPAH_Model_Difusi_Inovasi_Pemberdayaan_Masyarakat_dalam_Pengelolaan_Bank_Sampah_Alam_Lestari_di_Kota_Serang_Provinsi_Banten
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suparmoko, M., Sudirman, D., Setyarko, Y., Wibowo, H.S. (2014). *Valuasi Ekonomi Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*. Yogyakarta: BPFE.
- Tahoba, A. E. (2011). *Strategi Komunikasi Dalam Program Pengembangan Masyarakat (Community Development)*. Diakses dari https://ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_lnk.php?id=275
- Waluya, B. (2007). *SOSIOLOGI: Menyelami Fenomena Sosial di Masyarakat*. Bandung: PT Setia Purna Inves. Tersedia dalam <https://books.google.co.id/books?id=pGxmsW9Emc0C&pg=PA79&dq=data+primer+adalah+data+atau+keterangan+yang+diperoleh+peneliti+secara+langsung+dari+sumber+nya&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi54tWkmrzbAhWibisKHeh1Cm8Q6AEIKDAA#v=onepage&q=data%20primer%20adalah%20data%20atau%20keterangan%20yang%20diperoleh%20peneliti%20secara%20langsung%20dari%20sumbernya&f=false>
- Waskita, D. (2005). *Komunikasi Pembangunan Dan Pemberdayaan*. Jurnal Organisasi dan Manajemen. 1 (1), 32-40. Diakses dari <http://simpen.lppm.ut.ac.id/JOM/jom%20volume%201%20n0%201%20september%202005/4-waskita-jom.pdf>

Warnaen, A., Nurlaili., Romadi, U. (2016). *Proses Adopsi Inovasi Pada Petani Di Kecamatan Polobangkeng Utara Kabupaten Takalar*. Agric Ekstensia. 10 (2): 67-73. Diakses dari <https://www.stppmedan.ac.id/pdf/Jurnal%202016/.../09%20Andi%20Warnaen.pdf>

Wijaya, I. S. (2015). *Perencanaan Dan Strategi Komunikasi Dalam Kegiatan Pembangunan*. Lentera. 18 (1): 53-60. Diakses dari https://journal.iain-samarinda.ac.id/index.php/lentera_journal/article/download/.../331

